

**Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi
Kecurangan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP
Pratama Pekanbaru Tampan)**



Disusun Oleh :

MUHAMMAD FIQRI PRATAMA RAMBE

17312184

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2021

**Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi
Kecurangan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP
Pratama Pekanbaru Tampan)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Muhammad Fiqri Pratama Rambe

No. Mahasiswa: 17312184

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Pekanbaru, 08 September 2021

Penulis,



(Muhammad Fiqri Pratama Rambe)

HALAMAN PENGESAHAN

**Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi
Kecurangan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP**

Pratama Pekanbaru Tampan)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Muhammad Fiqri Pratama Rambe

No. Mahasiswa: 17312184

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 08 September 2021

Dosen Pembimbing,



(Umi Sulistiyanti, S.E., Ak., M.Acc, CA.,CPA)



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2021/2022, hari Jum'at, tanggal 08 Oktober 2021, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FIQRI PRATAMA RAMBE
NIM : 17312184
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan
Terdeteksi Kecurangan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika
Penggelapan Pajak
Dosen Pembimbing : Umi Sulistianti, SE., M.Accy.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Umi Sulistianti, SE., M.Accy.
Anggota Tim : Suwaldiman, M.Accy., Ak., CMA.



Yogyakarta, 08 October 2021

Rektor Program Studi Akuntansi,

Mahmudi, Dr., SE., M.Si., Ak., CMA
NIK. 023120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Disusun oleh : MUHAMMAD FIQRI PRATAMA RAMBE

Nomor Mahasiswa : 17312184

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 08 Oktober 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Umi Sulistianti, SE., M.Accy.

Penguji : Suwaldiman, M.Accy., Ak., CMA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia


Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan)”**, guna memenuhi syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang terang ini.

Dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini, penulis tidak lepas dari doa, dukungan, dan bantuan berbagai pihak mulai dari proses awal hingga akhir penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta segala kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan.
3. Bapak Zulfikar Rambe dan Ibu Fatma Novianti, selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dorongan, semangat, dan rasa

tanggung jawab bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan semangat..

4. Muhammad Rifqi Pratama Rambe, selaku kakak dari penulis dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan support, doa, dan motivasi.
5. Seluruh keluarga besar penulis yang telah mendukung dan memberikan doa.
6. Ibu Umi Sulistiyanti., S.E., Ak., M.Acc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, waktu, kritik, saran, dan arahan.
7. Bapak Fathul Wahid., S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Prof. Jaka Sriyana., SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
10. Mayang, Furi, dan wulan yang telah memberikan dukungan dan saran selama mengerjakan skripsi.
11. Rizky, Ari, Huda, Dika, dan Bagas yang telah menemani selama masa perkuliahan.
12. Hafis, Nadia, Tiyas, Cut, Rania yang telah banyak memberikan cerita selama masa perkuliahan.
13. Teman – teman akuntansi FBE UII angkatan 2017 yang telah memberikan kenangan selama masa perkuliahan.
14. Terima Kasih atas seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan berlipat ganda. Semoga tugas akhir ini dapat dijadikan pustaka yang mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA TUGAS AKHIR/SKRISI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Keadilan.....	9
2.1.2 Pajak	10
2.1.3 Fungsi dan Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.4 Persepsi Etika Penggelapan Pajak.....	12
2.1.5 Keadilan Pajak.....	12
2.1.6 Sistem Perpajakan	13
2.1.7 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	14
2.1.8 Diskriminasi	15
2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
2.3 Perumusan Hipotesis	21
2.3.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak.....	21

2.3.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak.....	22
2.3.3 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak.....	23
2.3.4 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak	24
2.4 Kerangka Penelitian	25
BAB III	26
3.1 Populasi dan Sampel	26
3.1.1 Populasi	26
3.1.2 Sampel	26
3.2 Metode Pengumpulan Data	26
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	27
3.3.1 Variabel Penelitian	27
3.3.2 Pengukuran Variabel	30
3.4 Metode Analisis Data	34
3.4.1 Analisis Deskriptif.....	34
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	35
3.4.2.1 Uji Normalitas.....	35
3.4.2.2 Uji Multikolinieritas	35
3.4.2.3 Uji Heterokedstasitas	35
3.5 Uji Hipotesis.....	36
3.5.1 Uji Koefisien Determinasi.....	36
3.5.2 Uji t.....	37
3.5.3 Uji F.....	37
BAB IV	38
4.1 Deskripsi Responden.....	38
4.1.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	38
4.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur	39
4.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	40
4.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan	40
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	41
4.3 Hasil Uji Kualitas Data.....	43

4.3.1 Hasil Uji Validitas	43
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas	45
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	45
4.4.1 Hasil Uji Normalitas.....	45
4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	46
4.4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	46
4.5 Hasil Regresi Berganda	47
4.5.1 Uji Parsial (Uji t).....	47
4.5.2 Koefisien Determinan (R^2).....	51
4.6 Pembahasan Penelitian	51
4.6.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak.....	52
4.6.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak	53
4.6.3 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak	54
4.6.4 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak	55
BAB V.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Keterbatasan	57
5.3 Saran.....	58
5.4 Implikasi Penelitian	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Variabel	30
Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur	39
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	40
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan	40
Tabel 4.5 Interval Rata-Rata Tanggapan Terhadap Variabel Penelitian	41
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Penelitian	42
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Validitas	44
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Reliabilitas	45
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	45
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas	46
Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas	47
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t)	48
Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	25
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

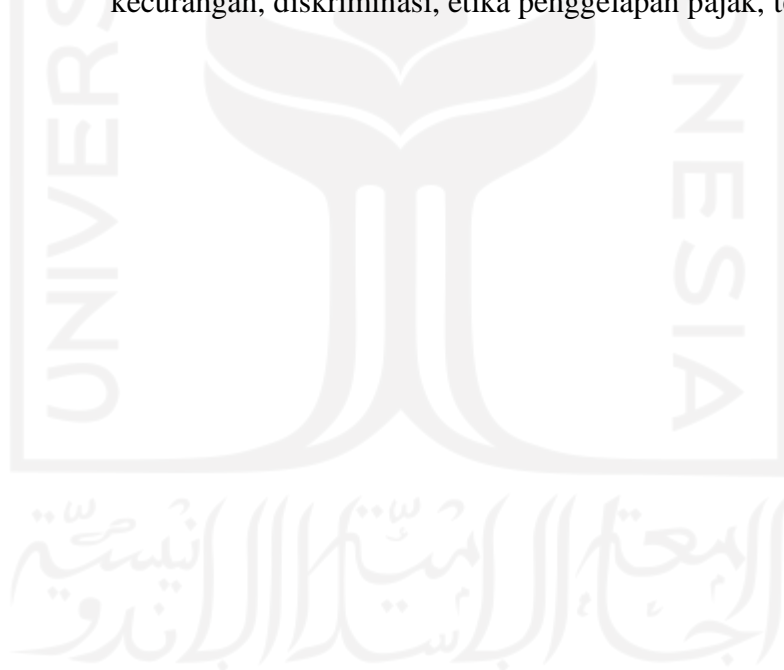
LAMPIRAN 1.....	64
LAMPIRAN 2.....	70
LAMPIRAN 3.....	85
LAMPIRAN 4.....	86
LAMPIRAN 5.....	87
LAMPIRAN 6.....	92
LAMPIRAN 7.....	93
LAMPIRAN 8.....	95
LAMPIRAN 9.....	96



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Berdasarkan metode tersebut, data diperoleh sebanyak 100 responden melalui penyebaran kuesioner secara konvensional dan online via google form. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Penelitian ini diolah menggunakan SPSS dengan metode regresi linear berganda dan dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak, variabel sistem perpajakan, dan variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan memiliki pengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Di sisi lain, variabel diskriminasi memiliki pengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.

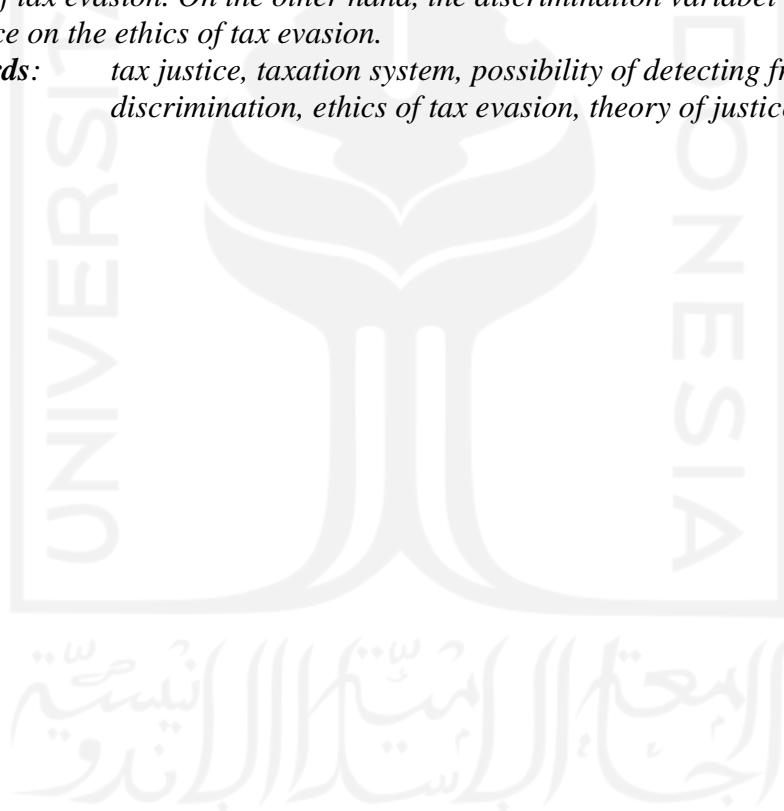
Kata Kunci: keadilan pajak, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan, diskriminasi, etika penggelapan pajak, teori keadilan



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax justice, the taxation system, the possibility of detecting fraud, and discrimination against the ethical perception of tax evasion. This type of research is a quantitative research. The population of this study is an individual taxpayer registered at the Pekanbaru Tampan Pratama Tax Service Office. The method used in this research is purposive sampling . based on this method, data were obtained as many as 100 respondents through the distribution of conventional and online questionnaires via google form. The theory used in this study is the theory of justice. This research was processed using SPSS with multiple linear regression method and in analyzing the research data using descriptive statistics, classical assumption test, and hypothesis testing. The results of this study indicate that the tax justice variabel, the tax system variabel, and the variabel the possibility of fraud being detected have a negative influence on the ethics of tax evasion. On the other hand, the discrimination variabel has a positive influence on the ethics of tax evasion.

Keywords: *tax justice, taxation system, possibility of detecting fraud, discrimination, ethics of tax evasion, theory of justice*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak didefinisikan sebagai pembayaran wajib kepada badan yang berwenang, namun tidak ada imbalan implisit yang diterima oleh pembayar (Palil, Malek, dan Jaguli 2016). Selain menjadi sumber pendapatan utama pemerintah, pajak merupakan cara lain untuk mencapai tujuan makro ekonomi suatu negara. Pajak dianggap sebagai elemen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Tanpa pajak suatu negara sulit menjadi negara maju dan demikian pula tanpa pajak tidak akan ada penggelapan pajak.

Penggelapan pajak menjadi cara ilegal dari perilaku wajib pajak untuk menghindari pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Brezeanu, Celea, dan Stanciu (2011) dari perspektif global, penggelapan pajak merupakan tindakan pencurian baik sebagian maupun keseluruhan dalam pembayaran pajak Negara, daerah, atau dana khusus di luar anggaran dengan cara apapun. Penggelapan pajak dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Penggelapan pajak menggambarkan serangkaian aktivitas yang tidak menguntungkan sistem perpajakan negara. Penggelapan pajak mengacu pada pengurangan pajak dengan cara hukum, dan mengacu pada tindakan pidana.

Penggelapan pajak menimbulkan kerusakan yang parah dalam hal makroekonomi, dan secara signifikan mengurangi pendapatan pemerintah

(Rahmawati & Ibrahim, 2016). Selain itu penggelapan pajak akan memengaruhi pengeluaran publik, yang menyebabkan berkurangnya proyek dan investasi sehingga menimbulkan resesi ekonomi, melumpuhkan target pembiayaan pembangunan ekonomi, dan pengelolaan proyek negara. Penggelapan pajak akan mengganggu prinsip pemerataan pajak, karena sebagian Wajib Pajak dapat lepas dari keuntungannya baik secara menyeluruh ataupun sebagian dari pembayaran pajak, sementara yang lain akan membayar, hal tersebut akan menambah beban keuangan mereka, karena negara harus menaikkan tarif pajak karena tidak mencapai keuangan yang diharapkan (Rahmawati & Ibrahim, 2016).

Kasus penggelapan pajak pernah terjadi di Indonesia, salah satunya pada tahun 2013 yang ditemukan oleh Penyidik Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau. Dari hasil penyelidikan ditemukan Wajib Pajak berinisial AP yang memiliki usaha di bidang alat-alat elektronik menyampaikan SPT yang tidak benar (Pajak.go.id). Kemudian kasus lainnya terjadi pada tahun 2016 yang dilakukan oleh MA sebagai direktur utama PT GMP. MA melakukan penggelapan pajak dengan melakukan pemungutan PPN dari PT Agro Sinergi Nusantara dan PT Potensi Bumi Sakti tanpa menggunakan SPT dan tidak disetorkan pada kas negara (Liputan6.com). Penggelapan pajak merupakan bagian dari etika wajib pajak. Menurut McGee & Djatej (2011), perspektif etika tentang penggelapan pajak dapat dikategorikan menjadi tiga sudut pandang yaitu

penggelapan pajak selalu tidak etis, penggelapan pajak terkadang tidak etis, dan penggelapan pajak tidak pernah tidak etis.

Faktor – faktor yang mungkin dapat berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak di antaranya yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan diskriminasi. Keadilan Pajak adalah tujuan hukum yang dicapai melalui Undang-undang dan pengumpulan pajak yang adil. Penerapan pajak dikatakan adil dalam undang-undang apabila diterapkan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak (Nugraha & Hajanirina, 2020). Sedangkan yang dimaksud adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, keterlambatan pembayaran pajak dan banding ke pengadilan pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Dalam penelitian McGee (2006) menyatakan, penggunaan uang yang berasal dari pajak keadilannya masih kurang, tingkat korupsi pemerintah yang tinggi dan manfaat uang pajak kurang dirasakan oleh masyarakat dianggap sebagai tindakan etis.. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiani & Jayanto (2016) dan Cahaya, Made, dan Zaki (2018) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak sedangkan hasil penelitian Nugraha & Hajanirina (2020), menunjukkan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.

Faktor kedua yang berhubungan dengan persepsi etika penggelapan pajak yaitu sistem perpajakan. Silaen (2015) menyatakan bahwa sistem

perpajakan adalah wujud fisik pelayanan dan keterlibatan wajib pajak baik secara pribadi maupun bersamaan melakukan tanggung jawab perpajakan yang diharuskan guna mendanai pemerintahan serta kemajuan bangsa. Gambaran sistem pajak ialah menyoal tinggi rendahnya tarif pajak dan pajak dipungut, tetapi apa benar dialokasikan untuk kepentingan umum, atau dikorupsi oleh pemerintah atau pejabat pajak (Suminarsasi & Supriyadi, 2012). Ketika prosedur perpajakan seperti perhitungan, pembayaran, dan pengarsipan mudah diselesaikan, sistem perpajakan dikatakan baik. Hasil studi yang dilakukan oleh Cahaya, Made, dan Zaki (2018) membuktikan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan Sulistiani & Jayanto (2016) membuktikan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Terdapat faktor pengaruh lainnya yang berdampak kepada wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat dideteksi dengan pemeriksaan pajak (Andrayuga, Sulindawati, dan Sujana 2017). Pemeriksaan pajak digunakan untuk memverifikasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ramli, Arifin, dan Yanuar 2020). Pemeriksaan ini dilakukan karena pemberlakuan *self assessment system* yang malah memberikan peluang besar terhadap wajib pajak yang ingin melakukan kecurangan pajak yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur dan benar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramli, Arifin, dan Yanuar (2020)

menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan memengaruhi etika penggelapan pajak secara positif sedangkan hasil penelitian Ulfa (2015) dan Andrayuga, Sulindawati, dan Sujana (2017) menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.

Faktor terakhir yang dapat berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi terhadap perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa dan aspek kehidupan yang lain. Bentuk diskriminasi yang dilakukan pemerintah adalah apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu, dan sebaliknya pihak lain dirugikan. Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2012), terdapat beberapa kebijakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi perpajakan di Indonesia, seperti penerapan zakat bagi umat Islam sebagai pengurang kewajiban perpajakan. Hasil studi sebelumnya menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak seperti pada penelitian oleh Cahaya, Made, dan Zaki (2018) sedangkan Sulistiani & Jayanto (2016) membuktikan diskriminasi tidak berpengaruh pada etika penggelapan pajak.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian ulang terhadap pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru. Berdasarkan permasalahan

tersebut, maka judul yang akan diambil dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
3. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
4. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah meliputi:

1. Untuk menguji pengaruh keadilan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

4. Untuk menguji pengaruh diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak :

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk peneliti lain serta pembaca sebagai referensi untuk memahami tentang pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, penemuan kecurangan dan diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berguna bagi KPP Pratama Pekanbaru untuk mempersiapkan strategi baru dan merencanakan untuk mengevaluasi tindakan-tindakan penggelapan pajak dengan memahami pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Disebutkan di bawah ini sistematika yang dipakai:

BAB I: PENDAHULUAN

Ini adalah bab pertama dari makalah ini, dan ini menjelaskan sejarah topik, definisi masalah, tujuan studi, keunggulan studi, dan sistematika sastra.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Landasan teoritis untuk pembuatan hipotesis penelitian disajikan dalam bab ini, yang didukung oleh penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan alur penelitian yang berupa populasi beserta sample, variabel, serta teknik analisa dan metode pengumpulan data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengandung hipotesis teruji serta pemaparan hasil uji yang dilakukan melalui statistik deskriptif serta dikaitkan dengan riset lampau.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengandung simpulan seluruh proses uji serta membahas riset yang dilakukan, batasan dalam penelitiannya serta saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keadilan

Teori keadilan mengacu pada pikiran, perasaan, dan sudut pandang individu, serta bagaimana ketiga faktor ini memengaruhi perilaku individu tersebut. Konsep ini menjelaskan manfaat yang akan Anda peroleh jika melakukan tugas sesuai dengan kriteria yang sesuai. Besarnya insentif yang akan diperoleh seseorang akan berdampak pada tingkat motivasi atau perilaku mereka (Sari, 2015). Keadilan bisa memperlihatkan perbandingan dalam kelompok individu yang akan menjadi parameter atau tolak ukur kinerja seorang individu.

Teori keadilan sangat cocok untuk menjelaskan bagaimana orang berperilaku dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka kepada pemerintah. Jika wajib pajak percaya bahwa pemungutan pajak adalah wajar, mereka akan memenuhi tanggung jawab mereka dengan bebas. Apabila Wajib Pajak diperlakukan tidak adil dalam memenuhi kewajibannya, maka Wajib Pajak lebih besar kemungkinannya untuk melakukan kecurangan dalam retribusi.

Terjadinya penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak. Kepentingan keberadaan perilaku adil wajib pajak dalam pemungutan pajak dapat berdampak kepada kepatuhan dalam pembayaran perpajakan. Teori keadilan dari John Rawls pada tahun 1971 menyatakan kewajiban pengumpulan pajak final, adil, serta merata. Keadilan tersebut mendorong seberapa besarnya kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.

2.1.2 Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Siti Resmi 2017) :

Pajak merupakan pengumpulan dana rakyat untuk kas Negara atas utusan Undan-Undang yang bersifat memaksa tanpa adanya kontraprestasi serta dipakai untuk mendanai pengeluaran umum.

Sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Pajak ialah sumbangan wajib untuk negara oleh pribadi ataupun perkantoran tanpa adanya kontraprestasi serta dipakai untuk mendanai pengeluaran negara untuk menunjang kemakmuran rakyat.

Ada beberapa kesejajaran dalam dua istilah di atas dalam hal ide atau konsep pajak. Hanya penggunaan fitur atau frasa linguistik yang berbeda antara kedua makna tersebut. Komponen dapat ditemukan di kedua pendapat:

- 1) Peraturan perundang-undangan mendasari pemungutan pajak.
- 2) Tidak terdapat kontraprestasi langsung.
- 3) Bersifat memaksa.
- 4) Kumpulan pajak akan menjadi sumber pendanaan pembangunan infrastruktur.

Pajak dapat disimpulkan, adalah pembayaran kepada pemerintah yang terutang oleh orang-orang yang diwajibkan untuk membayarnya menurut undang-undang dan tidak mendapatkan hasil yang dapat segera dibebankan.

2.1.3 Fungsi dan Sistem Pemungutan Pajak

Pajak adalah salah satu pemasukan Negara yang berfungsi ganda (Siti Resmi 2017), yaitu:

- 1) Fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*) sebagai pemasukan negara untuk pendanaan rutin atau pembangunan.
- 2) Fungsi pengatur (*regulerend*) sebagai instrumen pengatur pelaksanaan ketentuan pemerintah dalam sektor sosio-ekonomi untuk meraih target di luar seksi keuangan.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Siti Resmi 2017), yaitu sebagai berikut:

1) *Official Assessment system*

Merupakan sebuah metode pengambilan pajak yang memberikan aparat pajak wewenang untuk memutuskan besaran pajak terutang per/tahun nya mengikuti UU perpajakan.

2) *Self Assessment System*

Adalah metode pemungutan yang memberi wewenang wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya.

3) *With Holding System*

Adalah suatu metode pemungutan yang memberikan kuasa untuk pihak eksternal yang dimandatkan guna menentukan jumlah pajak terutang mengikuti UU perpajakan.

2.1.4 Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Etika perpajakan adalah sebuah tindakan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku agar pembangunan negara terlaksana dengan baik (Izza & Hamzah, 2009). Etika perpajakan dianggap sebagai aturan yang mengatur individu dalam bidang perpajakan, bagaimana mereka menjalankan kewajiban perpajakannya, apakah yang telah dilakukannya dengan benar, salah, baik atau buruk (Suminarsasi & Supriyadi, 2012). Dapat disimpulkan bahwa etika perpajakan merupakan suatu perilaku di bidang perpajakan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

Pada dasarnya penggelapan pajak merupakan perbuatan menyimpang karena melanggar aturan yang telah ditetapkan dan dapat merugikan orang lain. Dalam arti lain, penggelapan pajak adalah perlakuan tidak etis. Kurniawati & Toly (2014) menyatakan bahwa, “penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara ilegal yang dipergunakan oleh Wajib Pajak maupun aparat pajak dengan tujuan memberi keuntungan pribadi karena hal ini masih termasuk mengurangi dan manipulasi maka tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.1.5 Keadilan Pajak

Seorang individu dapat menggunakan kriteria yang berbeda dalam membuat pilihan etis. Salah satu kriterianya adalah fokus pada keadilan atau *fairness* (Robbins & Judge, 2014). Keadilan dianggap sebagai hak dasar, akibatnya, contoh ketidakadilan yang dirasakan dapat menghasilkan emosi pribadi yang intens. Keadilan pajak mengarah pada sikap yang lebih baik

dan positif terhadap pajak. Dapat dikatakan bahwa keadilan pajak memengaruhi sikap etis wajib pajak (Siahaan, 2005).

Pada dasarnya wajib pajak yang mampu melakukan pembayaran harus dikenakan kewajiban perpajakan yang sama, sedangkan wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang berbeda harus dikenakan beban pajak yang berbeda pula. Selain itu, keadilan pajak juga memperhatikan keadilan prosedural yaitu menyerahkan haknya guna pengajuan keberatan, menunda pembayaran serta pengajuan banding kepada badan pemeriksa pajak. Persepsi keadilan dapat memengaruhi sikap etis wajib pajak karena pajak yang adil akan meningkatkan nilai etika (Siahaan, 2005)

2.1.6 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan berhubungan dengan naik turunnya tarif serta penyortiran dana yang telah dibayarkan (Bahari, 2016). Tarif pajak dan distribusi dana pajak terkait erat dengan pemungutan pajak. Sistem perpajakan digambarkan dalam hal tarif pajak yang lebih rendah dan lebih tinggi, dan di mana pembayaran pajak dikumpulkan. Benarkah digunakan untuk belanja publik, atau dikorupsi oleh negara atau otoritas pajak. (Suminarsasi & Supriyadi, 2012).

Sistem perpajakan merupakan representasi dari komitmen dan keterlibatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mendanai agenda pemerintahan dan pertumbuhan nasional. Wajib Pajak ditugasi memfasilitasi kerja sama nasional dengan melakukan perhitungan,

penetapan, penyetoran serta pelaporan mandiri (self assessment) (Silaen, 2015).

2.1.7 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Kemungkinan terdeteksi kecurangan sangat erat hubungannya dengan tahap pemeriksaan pembayaran pajak. Pemeriksaan pajak digunakan untuk memverifikasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan diadakannya pengecekan, maka pendeteksian kecurangan akan membesar (Andrayuga, Suidawati, dan Sujana, 2017). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009” :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan berpotensi untuk mengungkap kecurangan wajib pajak. Pemeriksaan memiliki kemampuan untuk mengurangi individu dari terlibat dalam penipuan keuangan. Jika orang yang membayar percaya

bahwa kemungkinan penipuan ditemukan besar, mereka cenderung mengikuti persyaratan hukum. (Fatimah & Wardani, 2017)

2.1.8 Diskriminasi

Menurut Dimuk & Ahmad (2018) diskriminasi merupakan aktivitas dituju kepada seseorang atau organisasi tertentu yang didasarkan etnis, ras, kepercayaan, maupun kedudukan sosial. Diskriminasi pajak merupakan perilaku yang tidak proporsional kepada individu ataupun kelompok yang penyebabnya merupakan diterapkannya sebuah ketentuan yang merugikan sepihak (Suminarsasi & Supriyadi, 2012).

Contohnya bentuk peraturan yang dianggap diskriminasi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 yang mengatur mengenai zakat yang disumbangkan umat Musliming termasuk bentuk pengurangan penghasilan bruto yang tidak termasuk dalam perpajakan yang dibayar. Selain itu, Peraturan pemerintah No.46 Thn 2013 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima / Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, ditetapkan bahwa pajak ditentukan sejumlah 1 persen dari penghasilan bruto. (Ningsih & Pusposari, 2016). Hal ini menimbulkan pandangan bahwa penghindaran pajak adalah etis atau diinginkan meskipun tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku (Ningsih & Pusposari, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Peneliti	Hasil Penelitian
----	----------	-------	-------------------	------------------

1	Silaen (2015)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Perpajakan 2. Diskriminasi Teknologi dan 3. Informasi Perpajakan <p>Variabel Dependen: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika penggelapan pajak terpengaruh negatif oleh sistem perpajakan. 2. Etika penggelapan pajak berpengaruh positif oleh diskriminasi. 3. Etika penggelapan pajak terpengaruh negatif oleh TI.
2	Ulfa (2015)	Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pemerintah terhadap penggelapan pajak	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan 2. Teknologi dan Informasi Perpajakan 3. Kepercayaan pada Otoritas Pemerintah <p>Variabel Dependen: Penggelapan pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak 2. Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak 3. Kepercayaan pada otoritas pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak
3	Sulistiani & Jayanto (2016)	<i>Factors Affecting Individual Tax Payer Attitude to Do Tax Evasion (Empirical Study on Apparatus/ Public Official</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Kepatuhan 2. Keadilan Pajak 3. Pelayanan Aparat Pajak 4. Pemahaman Perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap ketidakpatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion.

		<i>in Purbalingga District</i>	<p>5. Diskriminasi Pajak</p> <p>6. Sistem Perpajakan</p> <p>7. Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Penggelapan Pajak</p>	<p>3. Keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion.</p> <p>4. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion.</p> <p>5. Pelayanan aparat pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tindakan tax evasion</p> <p>6. Diskriminasi pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tindakan tax evasion</p> <p>7. Sistem perpajakan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tindakan tax evasion</p>
4	Fatimah & Wardani (2017)	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung	<p>Variabel Independen:</p> <p>1. Sistem Perpajakan</p> <p>2. Norma Subjektif</p> <p>3. Diskriminasi</p> <p>4. Kualitas Pelayanan Pajak</p> <p>5. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan</p> <p>6. Keadilan Pajak</p> <p>7. Kepatuhan Pajak</p> <p>Variabel Dependen:</p>	<p>1. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</p> <p>2. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</p> <p>3. Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</p> <p>4. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</p> <p>5. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak</p>

			Penggelapan Pajak	<p>6. Keadilan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak.</p> <p>7. Kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak.</p>
5	Andrayuga, Sulindawati, Sujana (2017)	Pengaruh penerapan e-faktur, biaya kepatuhan, system perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) pada KPP pratama singlaraja	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan E-Faktur 2. Biaya Kepatuhan 3. System Perpajakan 4. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan <p>Variabel Dependen: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan e-faktur berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak 2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak 3. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak 4. Biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
6	Cahaya, Made, Zaki (2018)	<i>The Determinants Perception of Tax Evasion Ethics</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan 2. Sistem Perpajakan 3. Diskriminasi 4. Cinta akan uang 5. Religiusitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. 2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

			Variabel Dependen: Persepsi Etika Penggelapan Pajak	<p>3. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.</p> <p>4. Cinta akan uang berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.</p> <p>5. Religiusitas memperkuat pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak.</p> <p>6. Religiusitas melemahkan pengaruh cinta uang terhadap persepsi etika penggelapan pajak.</p>
7	Dimuk & Ahmad (2018)	<i>The Effect of Tax System and Discrimination on Tax Evasion</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Perpajakan 2. Diskriminasi <p>Variabel Dependen: Penggelapan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 2. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
8	Pratiwi & Prabowo (2019)	Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan 2. Diskriminasi <p>Variabel Dependen: Penggelapan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. 2. Diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

9	Ervana (2019)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pajak 2. Keadilan Pajak 3. Tarif Pajak <p>Variabel Dependen:</p> <p>Etika Penggelapan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak 2. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 3. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
10	Ramli, Arifin, Yanuar (2020)	<i>Taxation System, Tax Sanction, Justice, Discrimination, and Probability of Cheat Detect Impact on Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Ethic</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Perpajakan 2. Keadilan 3. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan <p>Variabel Dependen:</p> <p>Persepsi Wajib Pajak Tentang Etika Penggelapan Pajak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak tentang etika penggelapan pajak 2. Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak tentang etika penggelapan pajak 3. Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak tentang etika penggelapan pajak. 4. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 5. Diskriminasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak

				mengenai etika penggelapan pajak.
11	Nugaha & Hajanirina (2020)	<i>Taxpayers' Perception of Tax Evasion studied From Tax Knowledge, Tax Fairness, and Tax Dicrimination</i>	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Pajak 2. Keadilan Pajak 3. Diskriminasi Pajak Variabel Dependen: Persepsi Penggelapan Pajak	1. Pengetahuan pajak berhubungan positif dan signifikan dengan persepsi penggelapan pajak 2. Keadilan pajak berhubungan positif dan signifikan dengan persepsi penggelapan pajak 3. Diskriminasi pajak berhubungan positif dan signifikan dengan persepsi penggelapan pajak

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Ningsih & Pusposari (2016) menyoroti bahwa keuntungan yang dialami banyak individu sebagai akibat dari fasilitas negara yang dapat diakses akan meningkatkan kepercayaan dalam pengelolaan uang pajak oleh pemerintah. Jika wajib pajak percaya bahwa pemungutan pajak itu adil, mereka akan dengan sengaja dan bebas melakukan tugas kepada pemerintah.

Persepsi kepentingan adanya adil pajak dan pembayarannya dapat berdampak kepada sikap wajib pajak pada kegiatan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori keadilan di mana dalam hal perpajakan seorang wajib pajak harus mendapatkan perlakuan yang sama rata. Dengan adanya keadilan tersebut maka akan meningkatkan kepercayaan rakyat tentang pihak

berwajib yang memunculkan perasaan aman apabila membayar pajak. Apabila keadilan pajak meningkat, maka kejadian penggelapan pajak dilihat tidak etis. Sementara, apabila keadilan pajak menurun, perlakuan penggelapan pajak dianggap etis (Nugraha & Hajanirina, 2020).

Hasil studi yang dilakukan oleh (Sulistiani & Jayanto, 2016) dan Cahaya, Made, Zaki (2018) membuktikan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak

2.3.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan pada dasarnya menjadi mekanisme pemungutan pajak untuk tarif pajak tinggi dan rendah, serta tanggung jawab pembayaran pajak yang diperlukan untuk mendanai administrasi dan pertumbuhan pemerintah. Sistem perpajakan saat ini dan yang diterapkan telah menjadi patokan bagi wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori keadilan dalam hal perpajakan, sudah seharusnya sebuah sistem perpajakan mengedepankan keadilan bagi setiap wajib pajak.

Sistem perpajakan yang baik akan membuat individu lebih cenderung untuk mematuhi tanggung jawab perpajakannya dan mempercayai sistem untuk mengelola uang pajak sesuai undang-undang. Sebaliknya, sistem

perpajakan dianggap buruk jika petugas pajak melakukan kecurangan dalam pelaksanaannya. (Ningsih & Pusposari, 2016).

Hasil studi yang dilakukan oleh Silaen (2015) dan Cahaya, Made, dan Zaki (2018) membuktikan sistem perpajakan berdampak negatif terhadap etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak

2.3.3 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak (Andrayuga, Sulindawati, dan Sujana 2017). Pemeriksaan berpengaruh menghadang wajib pajak bertindak *tax evasion*. Kemungkinan sebuah pemeriksaan dilaksanakan mengikuti peraturan perpajakan mampu mengidentifikasi kecurangan wajib pajak.

Disaat seorang melihat presentasi kecenderungan ditemukannya kecurangan melalui pemeriksaan berjumlah tinggi, maka ia condong mematuhi aturan karena rasa takut apabila diperiksa dan didenda karena terbukti menyalahi prosedur. Oleh sebab itu perlu adanya penerapan teori keadilan di mana pemungutan pajak yang berjalan harus bersifat adil antara setiap wajib pajak sehingga dapat menekan keinginan untuk berbuat kecurangan.

Sejumlah riset terdahulu menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak seperti Ulfa (2015) dan Ramli, Arifin, Yanuar (2020). Dari pemaparan tersebut, hipotesis ke tiga yang diajukan ialah:

H3: Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak

2.3.4 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Diskriminasi pajak berupa undang-undang mengenai pajak yang dirancang pihak berwajib yang bersifat tidak adil atau menguntungkan sebelah pihak saja (Silaen 2015). Padahal menurut teori keadilan seorang wajib pajak akan timbul rasa percaya dan aman ketika merasa mendapat perlakuan yang adil dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kepada pemerintah. Tentu saja masyarakat berhak mendapatkan ketetapan dan menerima perlakuan adil dalam pemungutan pajak.

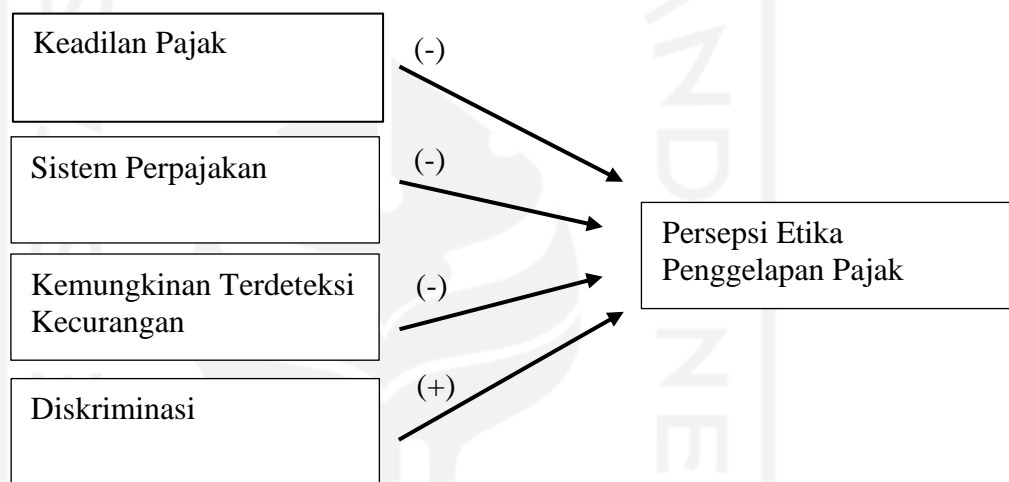
Kemunculan stigma tentang diskriminasi perpajakan bagi Wajib Pajak berdampak kepada sikap serta niat seseorang membayar pajaknya (Nugraha & Hajanirina, 2020). Berdasarkan Suminarsasi & Supriyadi (2012) jika level diskriminasi meningkat, perlakuan penggelapan pajak dianggap etis, sedangkan apabila level diskriminasi rendah maka perlakuan penggelapan pajak dianggap tidak etis.

Sejumlah riset terdahulu memaparkan bahwa diskriminasi memengaruhi etika penggelapan pajak secara positif seperti Cahaya, Made,

dan Zaki. (2018) dan Dimuk & Ahmad (2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis keempat yang diajukan adalah:

H4: diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi merupakan sekelompok elemen maupun perorangan yang dijadikan pusat informasi sebuah riset (Hadi, 2006). Pada penelitian ini, populasinya ialah wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

3.1.2 Sampel

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sebanyak 160.014 wajib pajak. Agar mengetahui besaran sampel yang diambil pada riset ini, maka dapat menggunakan rumus slovin (Umar, 2013), yaitu:

$$n = \frac{n}{1 + N a^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah populasi

α = tingkat kesalahan yang ditoleransi (10%)

Perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini dengan menggunakan rumus slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{160.014}{1 + 160.014 \times 10\%^2}$$

n = 99,93 dibulatkan menjadi 100 orang

3.2 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dipakai pada riset ini merupakan data primer yang disumberkan dari objeknya langsung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode angket (kuesioner).

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Penelitian

Untuk mendapatkan bukti secara empiris dampak keadilan pajak, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak, oleh karena itu variabel yang dipakai pada riset ini adalah dua variabel yaitu independent dan dependent, yaitu:

a. Variabel Independen

1. Keadilan Pajak

Dalam penelitian ini, keadilan pajak diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Keadilan dalam penyusunan undang-undang.
- b. Penggelapan pajak adalah etis, jika dana pajak digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan keuntungan bagi saya.
- c. Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.
- d. Penggelapan pajak dianggap etis apabila pemerintah tidak adil pada pembentukan undang-undang pajak.
- e. Apabila aparat pajak tidak adil dalam melaksanakan peraturan perpajakan, penggelapan pajak dianggap etis.

2. Sistem Perpajakan

Dalam penelitian ini, sistem perpajakan diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Penggelapan pajak dianggap etis, jika sistem perpajakan yang ada tidak adil.

- b. Penggelapan pajak dianggap etis apabila tarif pajak tidak menyesuaikan dengan tingkat penghasilan.
- c. Penggelapan pajak dianggap etis apabila uang tidak digunakan secara baik.
- d. Penggelapan pajak dianggap etis, jika prosedur pembayaran pajak ada yang menyulitkan.
- e. Penggelapan pajak dianggap etis, jika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyebarluaskan informasi pembayaran guna menjunjung kemudahan.

3. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Dalam penelitian ini, kemungkinan terdeteksi kecurangan diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Mengisi surat pemberitahuan tahunan dengan benar.
- b. Tingkat ketatnya pemeriksaan pajak.
- c. Tingkat kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam pengisian SPT rendah.
- d. Diterapkan pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan.

4. Diskriminasi

Dalam penelitian ini, diskriminasi diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Jika agama, ras dan latar belakang budaya didiskriminasi oleh negara, maka penggelapan pajak dianggap etis.

- b. Jika seseorang membuat pendapat politik dan hal tersebut membuatnya dipenjara, maka penggelapan pajak dianggap etis.
- c. Diskriminasi kepada hal yang penyebabnya adalah manfaat pajak.
- d. Peraturan yang ditentukan merugikan sebagian pihak.

b. Variabel Dependen

Pada riset ini, variabel dependen yang digunakan adalah persepsi etika penggelapan pajak, adapun indikator yang digunakan sebagai berikut:

- a. Jika pengeluaran umum negara tidak dibiayai dengan uang pajak, maka penggelapan pajak menjadi etis.
- b. Jika pajak yang telah dibayarkan tidak dirasakan manfaatnya oleh saya, maka penggelapan pajak dianggap menjadi etis.
- c. Jika hukum yang berlaku menjadi lemah, maka akan terjadi penggelapan pajak.
- d. Jika di dalam perpajakan terdapat diskriminasi maka penggelapan pajak dianggap menjadi etis.
- e. Jika pemerintah melakukan korupsi, maka penggelapan pajak dianggap menjadi etis.
- f. Penggelapan pajak etis apabila tidak terdapat transparansi dalam pemakaian uang pajak.

3.3.2 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel diukur menggunakan skala interval dengan menggunakan empat skala:

Sangat Setuju (SS)	Skor 4
Setuju (S)	Skor 3
Tidak Setuju (TS)	Skor 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	Skor 1

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur	Sumber
Variabel Dependen: persepsi etika penggelapan pajak (Y)	usaha untuk mengecilkan beban pajak dengan cara tidak legal atau melanggar peraturan yang berlaku.	<p>a. Jika pengeluaran umum negara tidak dibiayai dengan uang pajak, maka penggelapan pajak menjadi etis.</p> <p>b. Jika pajak yang telah dibayarkan tidak dirasakan mafaatnya oleh saya, maka penggelapan pajak dianggap menjadi etis.</p> <p>c. Jika hukum yang berlaku menjadi lemah, maka akan terjadi penggelapan pajak.</p> <p>d. jika di dalam perpajakan terdapat diskriminasi</p>	Skala Interval	Ningsih & Pusposari (2014)

		<p>maka penggelapan pajak dianggap menjadi etis.</p> <p>e. Jika pemerintah melakukan korupsi, maka penggelapan pajak dianggap menjadi etis.</p> <p>f. Penggelapan pajak etis apabila tidak terdapat transparansi dalam pemakaian uang pajak.</p>		
Variabel Independen: Keadilan Pajak (X1)	keadilan dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang pajak, serta keadilan dalam penggunaan uang pajak.	<p>a. Keadilan dalam penyusunan undang-undang</p> <p>b. Penggelapan pajak adalah etis, jika dana pajak digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan keuntungan bagi saya</p> <p>c. Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.</p> <p>d. Penggelapan pajak dianggap etis apabila pemerintah tidak adil pada pembentukan</p>	Skala Interval	Ningsih & Pusposari (2014), Cahaya (2018) dan Ervana (2019)

		<p>undang-undang pajak.</p> <p>e. Apabila aparat pajak tidak adil dalam melaksanakan peraturan perpajakan, penggelapan pajak dianggap etis.</p>		
Variabel Independen: Sistem Perpajakan (X2)	Keseluruhan yang terpadu dari satuan kegiatan perpajakan yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan dalam perpajakan itu sendiri.	<p>a. Penggelapan pajak dianggap etis, jika sistem perpajakan yang ada tidak adil.</p> <p>b. Penggelapan pajak dianggap etis apabila tarif pajak tidak menyesuaikan dengan tingkat penghasilan.</p> <p>c. Penggelapan pajak dianggap etis apabila uang tidak digunakan secara baik.</p> <p>d. Penggelapan pajak dianggap etis, jika prosedur pembayaran pajak ada yang menyulitkan</p> <p>e. Penggelapan pajak dianggap etis, jika Direktorat Jenderal Pajak</p>	Skala Interval 1	Ningsih & Pusposari (2014) dan Cahaya (2018)

		(DJP) tidak menyebarluaskan informasi pembayaran guna menjunjung kemudahan.		
Variabel Independen: Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X3)	Seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi surat pemberitahuan tahunan dengan benar b. Tingkat ketatnya pemeriksaan pajak. c. Tingkat kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam pengisian SPT rendah. d. Diterapkan pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan. 	Skala Interval	Ulfa (2015), Fatimah (2017), dan Marlina (2018)
Variabel Independen: Diskriminasi (X4)	Usaha manusia dengan kecenderungan untuk membedakan yang lain atas dasar faktor-faktor tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika agama, ras dan latar belakang budaya didiskriminasi oleh negara, maka penggelapan pajak dianggap etis b. Jika seseorang membuat pendapat politik dan hal tersebut membuatnya 	Skala Interval	Ningsih & Pusposari (2014), Silaen (2015), dan Edi, Trimutri, Suhendro (2016)

		<p>dipenjara, maka penggelapan pajak dianggap etis.</p> <p>c. Diskriminasi kepada hal yang penyebabnya adalah manfaat pajak.</p> <p>d. Peraturan yang ditentukan merugikan sebagian pihak.</p>		
--	--	--	--	--

3.4 Metode Analisis Data

Agar menganalisis dampak variabel independen terhadap dependen, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis dilaksanakan menggunakan software SPSS. Uji pada riset ini adalah:

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah teknik pengaturan serta analisa data kuantitatif untuk mendapatkan perkiraan sebuah aktivitas. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi deskripsi sebuah sebaran data melalui nilai maximum dan minimumnya serta rata-rata dan nilai standard deviation.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Gujarati & Porter (2013) berpendapat bahwa untuk mencegah kebiasaan, maka harus diuji dengan asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan mengidentifikasi apabila pada model tersebut, kedua variabel dependen dan independen memiliki persebaran data yang normal atau tidak yang dinilai melalui *kolmogorov-smirnov* > 0,05.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk melihat apakah model regresi menemukan keterkaitan antara faktor-faktor independen (independen). Nilai toleransi dan variasi komponen inflasi menunjukkan hal ini (VIF). Pengujian berhasil jika nilai VIF 10 dan nilai toleransi 0,1 menunjukkan bahwa model regresi adalah multikolinear.

3.4.2.3 Uji Heterokedastitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan mencari ketidaksamaan variabel residual di antara pengamatan. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak ada heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.5 Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis karena peneliti berusaha untuk mengetahui pengaruh berbagai variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Koefisien determinasi (R²) dan uji T. Model regresi penelitian ini diberikan:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Persepsi Etika Penggelapan Pajak

α	= Konstanta
X1	= Keadilan Pajak
X2	= Sistem Perpajakan
X3	= Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan
X4	= Diskriminasi
β	= Koefisien Regresi
ϵ	= Error/Tingkat Kesalahan

3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinan berfungsi mengidentifikasi sejauh apa kemampuan variabel independen dalam menjabarkan variabel dependen. Yang penting diketahui agar dapat menentukan besaran variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Jika nilai mencapai 1, maka variabel independen dapat menyajikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk prediksi.

3.5.2 Uji t

Uji-t berfungsi sebagai alat mengidentifikasi dampak signifikan di antara kedua variabel (Marlina, 2018). Untuk mendapatkan pengaruh tersebut maka digunakan tingkat 0.05. Hipotesis diterima apabila nilai tidak mencapai 0.05.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden melalui dua metode, yaitu secara konvensional dan online via google form. Penyebaran secara langsung kepada responden dengan alasan peneliti dapat secara langsung menemui serta wawancara dengan responden agar bisa meyakinkan responden mengenai keseriusan penelitian ini. Tidak hanya itu, metode pengkaji dapat meminimalisir kemungkinan kuesioner dijawab oleh responden yang tidak

tepat. Akan tetapi tidak semua calon responden bersedia untuk dijadikan responden, sehingga ada sebagian dari pengumpulan data kuesioner penyebarannya dilakukan secara tidak langsung melalui *google form* karena kondisi pandemi Covid 19 yang menyebabkan orang takut untuk berkomunikasi langsung dengan orang lain. Dan dari 100 kuesioner yang disebar, semuanya dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan sebagai bahan penelitian.

Dari 100 responden yang dikaji, ditinjau dari ciri setiap responden. Karakteristik respondent adalah penjelasan atau penggambaran tentang identity respondent. Adapun yang menjadi karakteristik responden dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia pendidikan terakhir dan pekerjaan.

4.1.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melihat responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Pria	48	48,0
2	Wanita	52	52,0
	Jumlah	100	100,0

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Tabel 4.1 berikut menunjukkan responden berdasarkan jenis kelamin. Sebanyak 48 orang (48%) responden berjenis kelamin pria dan 52 orang (52%) responden berjenis kelamin wanita. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin wanita.

4.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Untuk melihat responden berdasarkan tingkat umur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	25-30 tahun	26	26,0
2	31-35 tahun	13	13,0
3	36-40 tahun	9	9,0
4	> 40 tahun	52	52,0
	Jumlah	100	100,0

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Tabel 4.2 berikut menunjukkan responden berdasarkan tingkat umur. Sebanyak 26 orang (26%) responden berumur 25-30 tahun, 13 orang (13%) responden berumur 31-35 tahun, 9 orang (9%) responden berumur 36-40 tahun dan 52 orang responden berumur > 40 tahun. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa sebagian besar responden adalah berumur di atas 40 tahun.

4.1.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk melihat responden berdasarkan pendidikan terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	D3	4	4,0
2	S1	63	63,0
3	S2	11	11,0
4	S3	2	2,0
5	Lainnya	20	20,0
	Jumlah	100	100,0

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Tabel 4.3 berikut menunjukkan responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Sebanyak 4 orang (4%) responden dengan pendidikan D3, 63 orang (63%) dengan tingkat pendidikan S1, 11 orang (11%) dengan tingkat pendidikan S2, 2 orang (2%) dengan tingkat pendidikan S3 dan 20 orang (20%) dengan tingkat pendidikan lainnya. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat Pendidikan S1.

4.1.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Untuk melihat responden berdasarkan pekerjaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Pegawai Swasta	13	13,0
2	Pegawai Negeri	52	52,0
3	Wiraswasta	9	9,0
4	Lainnya	26	26,0
	Jumlah	100	100,0

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Tabel 4.4 berikut menunjukkan responden berdasarkan pekerjaan. Sebanyak 13 orang (13%) responden dengan pekerjaan pegawai swasta, 52 orang (52%) dengan pekerjaan pegawai negeri, 9 orang (9%) dengan pekerjaan wiraswasta dan 26 orang (26%) dengan pekerjaan lainnya. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa sebagian besar responden memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Statistik deskriptif untuk menganalisa data dengan deskripsi atau penggambaran data yang dikumpulkan sehingga dapat dibuat kesimpulan untuk generalisasi. Dengan mengetahui deskriptif statistik tersebut, maka dapat diperoleh persepsi responden terhadap hal yang diteliti dengan interval skala rata-rata sebagai berikut:

Tabel 4.5 Interval Rata-Rata Tanggapan Terhadap Variabel

Penelitian	
Interval	Kategori
3,25 – 4,00	Sangat Baik / Sangat Tinggi
2,50 – 3,24	Baik / Tinggi
1,75 – 2,49	Tidak Baik / Rendah
1,00 – 1,74	Sangat Tidak Baik / Sangat Rendah

Sumber: Sugiyono, 2013

Berdasarkan kuesioner yang telah tersebar, terkumpul respon responden atas setiap variabel penelitian yaitu:

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	Jumlah Item	Mean	Kategori
Etika Penggelapan Pajak	6	2,48	Rendah
Keadilan Pajak	5	2,95	Baik
Sistem Perpajakan	5	2,94	Baik
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	4	3,44	Sangat Tinggi
Diskriminasi	4	2,47	Rendah

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Dari Tabel 4.6 diketahui deskripsi tanggapan responden terhadap variabel penelitian. Persepsi responden terhadap masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel etika penggelapan pajak diukur dengan menggunakan 6 pernyataan, di mana diperoleh mean sebesar 2,48 yang terletak pada rentang skala 1,75 – 2,49 dengan kategori rendah. Artinya adalah bahwa usaha guna untuk mengecilkan beban pajak dengan cara tidak legal atau melanggar peraturan yang berlaku pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan kemungkinannya rendah terjadi.
2. Variabel keadilan pajak diukur dengan menggunakan 5 pernyataan, di mana diperoleh mean sebesar 2,95 yang terletak pada rentang skala 2,50 – 3,24 dengan kategori baik. Artinya adalah bahwa responden menilai keadilan dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang pajak, serta keadilan dalam penggunaan uang pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan terlaksana dengan baik.
3. Variabel sistem perpajakan diukur dengan menggunakan 5 pernyataan, di mana diperoleh mean sebesar 2,94 yang terletak pada rentang skala 2,50 – 3,24 dengan kategori baik. Artinya adalah bahwa responden menilai sistem perpajakan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sudah berjalan dengan baik.
4. Variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan diukur dengan menggunakan 4 pernyataan, di mana diperoleh mean sebesar 3,44 yang terletak pada rentang skala 3,25 – 4,00 dengan kategori sangat tinggi. Artinya adalah bahwa responden menilai kemungkinan terdeteksi

kecurangan jika dilakukan pemeriksaan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sangat tinggi.

5. Variabel diskriminasi terdeteksi kecurangan diukur dengan menggunakan 4 pernyataan, di mana diperoleh mean sebesar 2,47 yang terletak pada rentang skala 1,75 – 2,49 dengan kategori rendah. Artinya adalah bahwa responden menilai usaha kecenderungan aparaturnya untuk membedakan wajib pajak atas faktor-faktor tertentu pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sangat rendah terjadi.

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dipakai untuk pengukuran kesahan sebuah kuesioner dengan perbandingan nilai R-hitung dengan R-tabel dengan taraf signifikansi 5% untuk pengujian 2 sisi. Apabila $R\text{-hitung} > R\text{-tabel}$, maka dapat dikatakan alatnya valid dan sebaliknya. Nilai r tabel dapat diperoleh dengan persamaan $N - 2 = 100 - 2 = 98 = 0,197$. Dan diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan
Etika Penggelapan Pajak	EPP1	0,886	0,197	Valid
	EPP2	0,825	0,197	Valid
	EPP3	0,816	0,197	Valid
	EPP4	0,854	0,197	Valid
	EPP5	0,835	0,197	Valid
	EPP6	0,785	0,197	Valid
Keadilan Pajak	KP1	0,724	0,197	Valid
	KP2	0,674	0,197	Valid
	KP3	0,645	0,197	Valid
	KP4	0,771	0,197	Valid
	KP5	0,663	0,197	Valid

Sistem Perpajakan	SP1	0,760	0,197	Valid
	SP2	0,757	0,197	Valid
	SP3	0,756	0,197	Valid
	SP4	0,776	0,197	Valid
	SP5	0,651	0,197	Valid
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	KTK1	0,751	0,197	Valid
	KTK2	0,803	0,197	Valid
	KTK3	0,800	0,197	Valid
	KTK4	0,617	0,197	Valid
Diskriminasi	D1	0,869	0,197	Valid
	D2	0,787	0,197	Valid
	D3	0,859	0,197	Valid
	D4	0,852	0,197	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Dari Tabel 4.7 di atas diketahui nilai r hitung seluruh item pernyataan variabel $> r$ tabel (0,197). Artinya adalah bahwa item-item pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dinyatakan valid.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Sama halnya dengan pengujian validitas, uji reliabilitas dapat dilaksanakan secara statistik melalui penghitungan *Cronbach's Alpha*. Uji tersebut berfungsi sebagai pengukur keandalan kuesioner untuk dijadikan indikator variabel. Apabila koefisien tidak lebih kecil atau sama dengan 0.06 maka indikator valid. Ditemukan hasil uji yaitu:

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Batas	Keputusan
Etika Penggelapan Pajak	0,912	0,60	Reliabel
Keadilan Pajak	0,731	0,60	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,793	0,60	Reliabel
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	0,730	0,60	Reliabel
Diskriminasi	0,863	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui nilai reliabilitas seluruh variabel \geq 0,6, yang berarti instrumen pengukuran yang dipakai valid.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan menguji apabila pada model residual berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data, dapat menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, di mana model regresi dikatakan normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,200	Normal

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* uji *Kolmogorov Smirnov* diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Maka dari itu, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dirancang untuk mengetahui apakah model regresi menemukan adanya hubungan antara variabel bebas (independen). Jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, model regresi yang digunakan tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas.

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics	Keterangan
---------------------	-------------------------	------------

	Tolerance	VIF	
Keadilan Pajak	0,647	1,547	Bebas Multikolinearitas
Sistem Perpajakan	0,651	1,537	Bebas Multikolinearitas
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	0,965	1,036	Bebas Multikolinearitas
Diskriminasi	0,907	1,102	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel 4.10 diperoleh nilai tolerance seluruh variabel lebih besar dari 0,1 dan VIF kecil dari 10. Dapat diartikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dan pengamatan lain yang berbeda dalam suatu model regresi. Tes glejser adalah salah satu metode untuk menentukan apakah ada ketidaksetaraan seperti itu. Tidak ada indikasi disparitas seperti ini yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 5%.

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	T	sig.	Keterangan
Keadilan Pajak	-0,743	0,460	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Perpajakan	0,257	0,798	Bebas Heteroskedastisitas
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	0,129	0,898	Bebas Heteroskedastisitas
Diskriminasi	1,046	0,298	Bebas Heteroskedastisitas
Variabel Dependen: Abs_res			

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Dari Tabel 4.11 diketahui seluruh variabel independen tidak signifikan terhadap absolut residual (0,460; 0,798; 0,898 dan 0,298 > 0,05). Dapat

diambil keputusan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.5 Hasil Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen serta mencari besaran dampak beberapa variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Di samping itu juga analisis ini dapat meramalkan nilai variabel dependen apabila seluruh variabel dependen sudah diketahui nilainya.

4.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat dampak keadilan pajak, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak secara individu atau sendiri-sendiri. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel Independen	B	T	Sig.	Keterangan	Hipotesis
(Constant)	5,414				
Keadilan Pajak	-0,418	- 3,278	0,001	Negatif Signifikan	Diterima
Sistem Perpajakan	-0,404	- 3,236	0,002	Negatif Signifikan	Diterima
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	-0,483	- 4,132	0,000	Negatif Signifikan	Diterima
Diskriminasi	0,464	6,623	0,000	Positif Signifikan	Diterima
Variabel Dependen: Etika Penggelapan Pajak					

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 4.13, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$EPP = 5,414 - 0,418 KP - 0,404 SP - 0,483 KTK + 0,464 D + e$$

1. Nilai konstanta (a) sebesar 5,414. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka etika penggelapan pajak sebesar 5,414.
2. Nilai koefisien regresi variabel keadilan pajak sebesar $-0,418$. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan keadilan pajak sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan etika penggelapan pajak sebesar 0,418 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel sistem perpajakan sebesar $-0,404$. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sistem perpajakan sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan etika penggelapan pajak sebesar 0,404 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan sebesar $-0,483$. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kemungkinan terdeteksi kecurangan sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan etika penggelapan pajak sebesar 0,483 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
5. Nilai koefisien regresi variabel diskriminasi sebesar 0,464. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan diskriminasi sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan etika penggelapan pajak sebesar 0,464 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
6. Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi

probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

Kemudian pada Tabel 4.13 dapat dilihat masing-masing nilai t hitung dan signifikansi variabel independen. Dan diketahui nilai t tabel (uji 1 sisi pada tingkat signifikansi 5%) dengan persamaan $n - k - 1$; $\alpha = 100 - 4 - 1$; $0,05 = 95$; $0,05 = \pm 1,661$ (lihat tabel t pada lampiran). Dengan demikian maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Keadilan pajak. Diperoleh nilai t hitung sebesar $- 3,278$ dan signifikansi sebesar $0,000$. Dengan demikian maka t hitung ($- 3,278$) $<$ $- t$ table ($- 1,661$) atau signifikansi ($0,001$) $<$ $0,05$. Artinya adalah bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan diterima.
2. Sistem perpajakan. Diperoleh nilai t hitung sebesar $- 3,236$ dan signifikansi sebesar $0,002$. Dengan demikian maka t hitung ($- 3,236$) $<$ $- t$ table ($- 1,661$) atau signifikansi ($0,002$) $<$ $0,05$. Artinya adalah bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan diterima.
3. Kemungkinan terdeteksi kecurangan. Diperoleh nilai t hitung sebesar $- 4,132$ dan signifikansi sebesar $0,000$. Dengan demikian maka t hitung ($- 4,132$) $<$ $- t$

table ($-1,661$) atau signifikansi ($0,000$) $< 0,05$. Artinya adalah bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan diterima.

4. Diskriminasi. Diperoleh nilai t hitung sebesar $6,623$ dan signifikansi sebesar $0,000$. Dengan demikian maka t hitung ($6,623$) $> t$ table ($1,661$) atau signifikansi ($0,000$) $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi meningkatkan etika penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis bahwa diskriminasi berdampak menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan perspektif etika penghindaran pajak adalah diterima.

4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat persentase pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi

Variabel Independen	Variabel Dependen	R	R Square	Adjusted R Square
Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dan Diskriminasi	Etika Penggelapan Pajak	0,758	0,575	0,557

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Dari Tabel 4.14 diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar 0,557 atau 55,7%. Artinya adalah bahwa sebesar 55,7% variabel persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dipengaruhi oleh keadilan pajak, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan diskriminasi. Sedangkan sisanya sebesar 44,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan Penelitian

4.6.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sudah terlaksananya dengan baik persepsi wajib pajak akan keadilan dalam pelaksanaan dan penyusunan undang-undang pajak, artinya pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan penggunaan uang pajaknya adil. Kemudian dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Artinya adalah bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak maka persepsi etika penggelapan pajak akan semakin rendah dan sebaliknya, semakin buruk persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak maka persepsi terhadap etika penggelapan pajak akan semakin tinggi. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiani & Jayanto (2016) dan Cahaya, Made, Zaki (2018) yang

membuktikan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak pada tempat penelitiannya masing-masing.

Keuntungan yang dilihat banyak orang dari fasilitas negara yang dapat diakses akan meningkatkan kepercayaan dalam pengelolaan uang yang didanai pajak oleh pemerintah. Jika wajib pajak percaya bahwa perpajakan adalah adil, mereka akan dengan sengaja dan bebas melakukan tugas kepada pemerintah (Ningsih & Pusposari, 2016). Pandangan kepentingan keadilan pajak untuk individu wajib pajak dalam pembayarannya berdampak kepada sifat wajib pajak dalam perpajakan. Hal ini sejalan dengan teori keadilan di mana dalam hal perpajakan seorang wajib pajak harus mendapatkan perlakuan yang sama rata. Keadilan perpajakan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga menimbulkan rasa aman dalam membayar pajak. Semakin besar jumlah keadilan pajak, semakin banyak penggelapan pajak yang dianggap tidak bermoral. Penggelapan pajak, di sisi lain, dianggap terlibat dalam aktivitas etis (Nugraha & Hajanirina, 2020).

4.6.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Dari hasil penelitian diketahui bahwa persepsi wajib pajak akan sistem perpajakan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sudah berjalan dengan baik. Kemudian dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Artinya adalah bahwa semakin baik persepsi wajib

pajak terhadap sistem perpajakan maka persepsi etika penggelapan pajak akan semakin rendah dan sebaliknya, semakin buruk persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan maka persepsi terhadap etika penggelapan pajak akan semakin tinggi. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) dan Cahaya, Made, dan Zaki (2018) yang membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak pada tempat penelitiannya masing-masing.

Sistem perpajakan adalah sistem pemungutan pajak yang meliputi tarif pajak tinggi dan rendah, serta tanggung jawab kontribusi pajak yang diperlukan untuk mendanai administrasi dan pertumbuhan negara. Sistem perpajakan harus menekankan keadilan bagi semua wajib pajak berdasarkan prinsip keadilan dalam perpajakan. Sistem perpajakan yang berhasil akan memberikan kemudahan dan mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ningsih & Pusposari, 2016).

4.6.3 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Dari hasil penelitian diketahui bahwa persepsi wajib pajak terhadap kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sangat tinggi. Kemudian dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Artinya

adalah bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap kemungkinan terdeteksi kecurangan maka persepsi etika penggelapan pajak akan semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah persepsi wajib pajak terhadap kemungkinan terdeteksi kecurangan maka persepsi terhadap etika penggelapan pajak akan semakin tinggi. Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2015) dan Andrayuga, Sulindawati, Sujana (2017) dengan hasil penelitian bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada tempat penelitiannya masing-masing.

Kemungkinan terdeteksi kecurangan kecurangan melalui pemeriksaan pajak (Andrayuga, Sulindawati, dan Sujana 2017). Pemeriksaan memiliki kemampuan untuk mengurangi wajib pajak dari terlibat dalam penggelapan pajak. Persentase kemungkinan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menemukan penipuan wajib pajak dan dengan demikian memengaruhi penghindaran pajak. Ketika seseorang mempertimbangkan kemungkinan mendeteksi penipuan melalui pemeriksaan pajak, ia lebih cenderung mengikuti peraturan perpajakan. Oleh sebab itu perlu adanya penerapan teori keadilan di mana pemungutan pajak yang berjalan harus bersifat adil antara setiap wajib pajak sehingga dapat menekan keinginan untuk berbuat kecurangan.

4.6.4 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Dari hasil penelitian diketahui bahwa persepsi wajib pajak terhadap usaha aparaturnya cenderung membeda-bedakan wajib pajak atas faktor-faktor tertentu pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sangat rendah terjadi. Kemudian dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Artinya adalah bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap diskriminasi maka persepsi etika penggelapan pajak akan semakin tinggi dan sebaliknya, semakin rendah persepsi wajib pajak terhadap diskriminasi maka persepsi terhadap etika penggelapan pajak akan semakin rendah. Dengan demikian hipotesis ke empat dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahaya, Made, dan Zaki. (2018) dan Dimuk & Ahmad (2018) yang mendapatkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada tempat penelitiannya masing-masing.

Diskriminasi pada perpajakan dapat berbentuk UU perpajakan yang dirancang oleh pihak berwajib, yang berarti perundangan tersebut menguntungkan sejumlah pihak saja (Silaen 2015). Padahal menurut teori keadilan seorang wajib pajak akan timbul rasa percaya dan aman ketika merasa mendapat perlakuan yang adil dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kepada pemerintah. Tentu saja masyarakat berhak mendapatkan ketetapan dan menerima perlakuan adil dalam pemungutan pajak. Kemunculan persepsi tentang diskriminasi pada Wajib Pajak dapat

berdampak kepada perilaku serta niat seseorang untuk melakukan pembayaran pajak (Nugraha & Hajanirina, 2020). Berdasarkan Suminarsasi & Supriyadi (2012) dalam kenaikan Diskriminasi perpajakan, perlakuan penggelapan dianggap etis, sedangkan dalam indahnya diskriminasi maka penggelapan dilihat tidak etis.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil telitian yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya, dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu:

1. Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
3. Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
4. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

5.2 Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan, di antaranya:

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama di tempat lain. Hal ini disebabkan kondisi di beberapa daerah berbeda satu sama lain.
2. Objek yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel sehingga, masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pembanding di tempat lain berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Untuk dapat memperluas objek kajian yang tidak hanya meneliti tentang wajib pajak pribadi, tetapi juga perlu untuk melihat persepsi etika penggelapan wajib pajak badan.
3. Untuk dapat menggunakan variabel lain atau menambah variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang lain sehingga penelitian dapat dilihat dari sisi yang berbeda.

5.4 Implikasi Penelitian

Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan diskriminasi memengaruhi persepsi etika wajib pajak untuk penggelapan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang berpikir untuk melakukan penggelapan pajak apabila mereka merasakan adanya ketidakadilan dalam penyelenggaraan pajak. Kemudian adanya sistem perpajakan juga menjadi faktor wajib pajak dalam etika penggelapan pajak. Jika pemeriksaan pajak yang dilakukan baik maka akan timbul rasa khawatir wajib pajak akan kemungkinan terdeteksinya kecurangan penggelapan pajak jika dilakukan. Selanjutnya kebijakan yang cenderung membedakan wajib pajak atas faktor-faktor tertentu juga dapat menjadi penyebab meningkatnya etika penggelapan pajak. Kesemua variabel tersebut hendaknya dapat diperhatikan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan sehingga membuat wajib pajak menjadi percaya terhadap KPP dan tidak ragu dalam membayar pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrayuga, K. A. S., Sulindawati, N. L. G. E., & Sujana, E. (2017). Pengaruh Penerapan E-Faktur, Biaya Kepatuhan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/11384/7289>
- Bahari, N. A. P. (2016). Pengaruh pemahaman, sistem perpajakan, persepsi baik pada fiskus dan keadilan terhadap tindakan tax evasion. *Repository UMY*, 2, 1–23.
- Brezeanu, P., Celea, S., & Stanciu, A. N. A. P. (2011). Forms of Tax Evasion in Romania. Analytical Perspective. *Annals of the University of Petrosani: Economics*, XI(1), 33–42.
- Cahaya, N. D. N., Made, S., & Zaki, B. (2018). The Determinants Perception of Tax Evasion Ethics. *RJOAS*, 1(January), 131–140.
- Dimuk, M., & Ahmad, H. (2018). The effect of tax system and discrimination on tax evasion. *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*, 7(3), 162–165. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.25.17538>
- Direktorat jendral pajak. (2013). *Ditjen Pajak Jemput Paksa Tersangka Kasus Penggelapan Pajak di Riau*. Diakses pada 17 Desember 2020, <https://www.pajak.go.id/id/ditjen-pajak-jemput-paksa-tersangka-kasus-penggelapan-pajak-di-riau>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20>
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2014). *Ekonometrika : teori, konsep dan aplikasi dengan IBM SPSS 22*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D., & Porter, D. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.

Hadi, Syamsul. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi & Keuangan. Ekonosia

Izza, I. A. N., & Hamzah, A. (2009). Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. *Simposium Nasional Akuntansi XII*, 1–26.

Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–12.

Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Pundi*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.82>

McGee, R. W. (2006). Three views on the ethics of tax evasion. *Journal of Business Ethics*, 67(1), 15–35. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9002-z>

McGee, R. W., & Djatej, A. (2011). The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Hispanic Opinion. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.997541>

Ningsih, D. N. C., & Pusposari, D. (2016). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi, FEB, Universitas Brawijaya*, 3(1), 1–21.

Nugraha, B. A., & Hajanirina, A. (2020). Taxpayers' Perception of Tax Evasion Studied From Tax Knowledge, Tax Fairness, and Tax Discrimination. *Research In Management and Accounting*, 3(1), 43–51. <https://doi.org/10.33508/rima.v3i1.2747>

Palil, M. R., Malek, M. M., & Jaguli, A. R. (2016). Issues, challenges and problems with tax evasion: The institutional factors approach. *Gajah Mada International Journal of Business*, 18(2), 187–206. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.12573>

Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>

Rahmawati, R., & Ibrahim, S. S. (2016). an Appraisal of the Tax Evasion and Tax Avoidance System in Indonesia. *Akuntabilitas*, 8(2). <https://doi.org/10.15408/akt.v8i2.2880>

Ramli, I., Arifin, A. Z., & Yanuar. (2020). Taxation System, Tax Sanctions, Justice, Discrimination, and Probability of Cheat Detect Impact on Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Ethics (Study at Primary KPP in Yogyakarta). *Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)*, 439, 528–533. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.089>

Resmi, Siti. 2017. Perpajakan. Salemba Empat

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Robbins, S. P., & Judge, T. (2014). *Organizational Behaviour*. Pearson.

Sari, T. M. (2015). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari). In *Universitas Negeri Semarang*.

Siahaan, F. (2005). The Influence Of Tax Fairness, Ethical Attitudes And Commitment On Taxpayer Compliance Behavior. *International Journal of Accounting and Business Society*, 13(1), 33–44.

Silaen, C. (2015). pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). *Jom FEKON*, 2(2)

Silaen, C., Basri, Y. M., & Azhari. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JOMFekom*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>

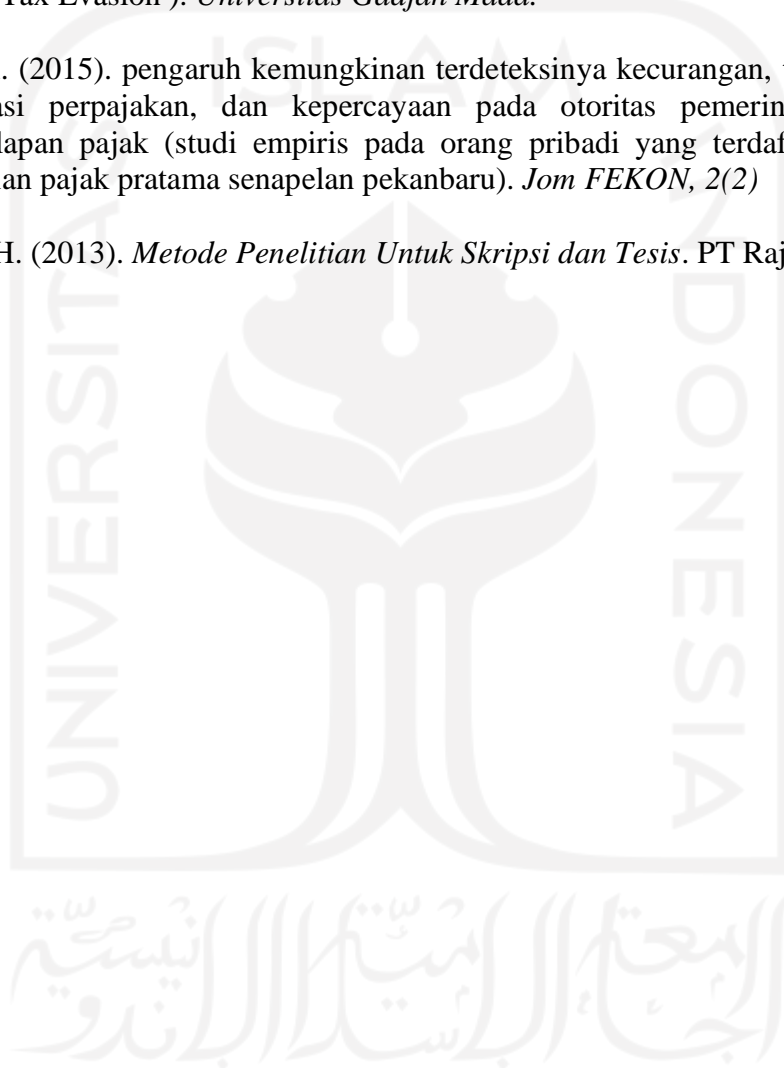
Sugiono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sulistiani, I., & Jayanto, P. Y. (2016). Factors Affecting Individual Tax Payers Attitude to Do Tax Evasion (Empirical Study on Apparatus/ Public Official in Purbalingga District). *Accounting Analysis Journal*, 5(4), 352–359. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i4.11595>

Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Universitas Gadjah Mada*.

Ulfa, A. (2015). pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pemerintah terhadap penggelapan pajak (studi empiris pada orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama senapelan pekanbaru). *Jom FEKON*, 2(2)

Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. PT Rajawali Press.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Kuesioner Penelitian

Hal: Pengisian Kuesioner Penelitian

Kepada

Yth Saudara/i:

Di Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, saya Muhamad Fiqri Pratama Rambe, yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan)”**.

Penelitian ini merupakan syarat untuk kelulusan dijenjang pendidikan Strata Satu (S1). Berkaitan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Saudara/i menjadi responden dalam penelitian saya dengan mengisi kuesioner yang diberikan. Semua informasi dari hasil penelitian hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Bantuan Saudara/i sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian ini. Atas bantuan dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

A. IDENTITAS RESPONDEN

INSTRUKSI:

Bacalah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan seksama, kemudian berilah tanda centang (√) untuk jawaban yang paling sesuai dengan situasi Anda.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
 - Pria
 - Wanita
3. Umur Responden :
 - 25-30 Tahun
 - 31-35 Tahun
 - 36-40 Tahun
 - >40 Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
 - D3
 - S1
 - S2
 - S3
 - Lainnya
5. Pekerjaan
 - Pegawai Swasta
 - Pegawai Negeri

- Wiraswasta
- Lainnya

A. VARIABEL

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda centang (√) pada kotak yang telah tersedia di bawah ini!
2. Pilihlah nilai skala yang sesuai dengan pendapat anda :
 - 1 = STS – Sangat Tidak Setuju
 - 2 = TS – Tidak Setuju
 - 3 = S – Setuju
 - 4 = SS – Sangat Setuju

ITEM PENGISIAN:

1. Variabel Dependen : Etika Penggelapan Pajak
Sumber : Ningsih & Pusposari (2014)

No	Etika Penggelapan Pajak	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum.				
2.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang dibayarkan.				
3.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila hukum perpajakan yang ada lemah.				

4.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan.				
5.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila pemerintahnya korupsi.				
6.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila pemerintah tidak transparan terhadap penggunaan uang pajak.				

2. Variabel Independen : Keadilan Pajak

Sumber : Ningsih & Pusposari (2014), Cahaya (2018) dan Ervana (2019)

No	Keadilan Pajak	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1.	Undang-undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil				
2.	Penggelapan pajak dianggap etis jika dana pajak digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan keuntungan bagi rakyat.				
3.	Menurut saya, setiap jenis pajak yang dibayarkan sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak				
4.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah tidak adil dalam penyusunan undang-undang perpajakan				
5.	Penggelapan pajak dianggap etis jika aparat pajak tidak adil dalam melaksanakan peraturan perpajakan.				

3. Variabel Independen : Sistem Perpajakan

Sumber : Ningsih & Pusposari (2014) dan Cahaya (2018)

No	Sistem Perpajakan	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika sistem perpajakan yang ada tidak adil.				
2.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajak yang dikenakan oleh Wajib Pajak (WP) tidak sesuai dengan tingkat penghasilan.				
3.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak yang terkumpul tidak dikelola dengan bijaksana				
4.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika prosedur pembayaran pajak ada yang menyulitkan				
5.	Menurut saya penggelapan pajak dianggap etis, jika Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) tidak memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak				

4. Variabel Independen : Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan
 Sumber : Ulfa (2015), Fatimah (2017), dan Marlina (2018)

No	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1.	Wajib pajak akan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan				

	benar untuk menghindari sanksi dan pemeriksaan				
2.	Pemeriksaan pajak dilakukan dengan ketat				
3.	Penggelapan pajak dilakukan jika kemungkinan terdeteksi atas kecurangan dalam pengisian SPT itu rendah				
4.	Fiskus harus melakukan pemeriksaan pajak secara teliti agar dapat mengidentifikasi segala bentuk kecurangan.				

5. Variabel Independen : Diskriminasi
 Sumber : Ningsih & Pusposari (2014), Silaen (2015), dan Edi, Trimutri, Suhendro (2016)

No	Diskriminasi	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah melakukan diskriminasi atas agama yang saya anut, ras, dan kebudayaan saya				
2.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah memenjarakan orang dikarenakan pendapat politiknya.				
3.	Penggelapan pajak dianggap etis jika wajib pajak merasa terdapat tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan				

4	Penggelapan pajak dianggap etis jika kebijakan pajak yang ditetapkan menguntungkan pihak tertentu saja.				
---	---	--	--	--	--

LAMPIRAN 2
TABULASI DATA

No	Etika Penggelapan Pajak						Jumlah	Rerata
	EPP 1	EPP 2	EPP 3	EPP 4	EPP 5	EPP 6		
1	3	3	3	4	2	2	17	2.83
2	2	2	2	2	2	3	13	2.17
3	4	3	3	3	4	3	20	3.33
4	1	1	2	2	3	2	11	1.83
5	1	1	1	1	3	4	11	1.83
6	2	2	2	2	3	3	14	2.33
7	2	2	2	2	2	2	12	2.00
8	1	4	1	1	1	1	9	1.50
9	1	1	1	1	1	1	6	1.00
10	1	2	1	1	2	1	8	1.33
11	2	3	3	2	1	3	14	2.33
12	1	1	1	1	3	3	10	1.67
13	2	2	2	2	3	3	14	2.33
14	3	4	3	3	4	3	20	3.33
15	1	1	1	1	1	1	6	1.00
16	2	2	3	3	2	2	14	2.33
17	2	2	2	2	2	2	12	2.00
18	2	2	1	1	2	2	10	1.67
19	3	4	3	4	3	4	21	3.50
20	3	3	2	3	2	3	16	2.67

21	3	2	3	2	3	2	15	2.50
22	2	3	3	3	3	3	17	2.83
23	2	2	3	3	3	3	16	2.67
24	4	4	4	4	3	4	23	3.83
25	1	1	1	1	1	1	6	1.00
26	1	1	1	1	1	2	7	1.17
27	3	3	3	4	4	2	19	3.17
28	2	1	2	1	1	2	9	1.50
29	1	1	2	1	1	1	7	1.17
30	3	2	2	3	2	3	15	2.50
31	3	2	3	4	3	2	17	2.83
32	2	2	3	3	2	1	13	2.17
33	2	1	2	2	3	2	12	2.00
34	3	4	2	3	3	4	19	3.17
35	3	3	2	3	4	3	18	3.00
36	2	2	2	1	2	2	11	1.83
37	4	3	4	3	3	4	21	3.50
38	3	2	3	2	3	2	15	2.50
39	3	2	3	4	2	2	16	2.67
40	4	3	4	3	3	3	20	3.33
41	4	3	3	3	3	3	19	3.17
42	2	2	3	2	2	3	14	2.33
43	2	2	3	3	2	2	14	2.33
44	2	3	3	3	3	3	17	2.83
45	1	1	1	3	2	2	10	1.67
46	3	2	3	3	3	3	17	2.83
47	4	4	3	4	4	3	22	3.67
48	2	2	3	3	3	3	16	2.67
49	2	2	4	4	4	4	20	3.33
50	3	2	3	2	2	2	14	2.33
51	1	1	1	1	1	2	7	1.17
52	4	3	4	4	3	2	20	3.33
53	2	2	2	2	2	2	12	2.00
54	4	3	4	4	3	4	22	3.67
55	3	3	2	2	3	3	16	2.67
56	2	3	2	1	2	3	13	2.17
57	3	3	3	3	3	3	18	3.00
58	3	2	2	2	3	3	15	2.50
59	3	4	3	3	4	4	21	3.50
60	3	3	2	2	3	3	16	2.67
61	3	2	2	3	2	2	14	2.33
62	2	3	2	2	3	3	15	2.50
63	2	2	3	2	2	2	13	2.17
64	3	4	3	4	4	4	22	3.67
65	2	3	2	3	3	2	15	2.50

66	2	2	2	3	2	2	13	2.17
67	3	3	3	3	4	3	19	3.17
68	3	3	3	4	4	3	20	3.33
69	3	3	4	3	3	2	18	3.00
70	3	2	2	3	3	2	15	2.50
71	3	3	4	4	4	4	22	3.67
72	4	3	3	4	3	3	20	3.33
73	3	3	4	4	3	4	21	3.50
74	3	4	3	3	2	2	17	2.83
75	3	3	4	4	3	3	20	3.33
76	3	3	3	4	3	2	18	3.00
77	3	4	3	3	3	3	19	3.17
78	2	2	3	3	2	2	14	2.33
79	2	1	2	3	2	1	11	1.83
80	3	3	3	4	3	3	19	3.17
81	1	1	1	1	1	1	6	1.00
82	3	4	4	3	4	4	22	3.67
83	2	2	2	2	2	2	12	2.00
84	1	1	1	3	3	3	12	2.00
85	1	1	4	1	1	1	9	1.50
86	1	1	3	2	3	3	13	2.17
87	2	2	2	2	2	2	12	2.00
88	2	3	3	2	2	2	14	2.33
89	4	4	4	4	4	4	24	4.00
90	1	1	1	2	1	1	7	1.17
91	3	4	3	4	3	3	20	3.33
92	1	2	1	2	1	1	8	1.33
93	3	4	3	4	3	3	20	3.33
94	4	4	4	4	4	4	24	4.00
95	1	1	2	2	2	2	10	1.67
96	3	3	3	3	3	3	18	3.00
97	1	1	2	1	2	1	8	1.33
98	1	1	1	1	1	1	6	1.00
99	1	2	1	2	1	2	9	1.50
100	2	2	2	3	2	3	14	2.33

No	Keadilan Pajak					Jumlah	Rerata
	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5		
1	3	3	3	3	4	16	3.20
2	3	3	2	3	3	14	2.80
3	3	2	4	3	3	15	3.00
4	2	2	2	2	3	11	2.20
5	3	3	4	3	3	16	3.20
6	3	3	4	4	3	17	3.40
7	3	3	3	3	3	15	3.00
8	4	3	4	3	3	17	3.40
9	4	3	3	3	3	16	3.20
10	4	3	4	4	3	18	3.60
11	2	1	3	2	2	10	2.00
12	3	3	3	3	3	15	3.00
13	2	1	3	2	2	10	2.00
14	3	3	2	2	2	12	2.40
15	4	4	2	2	2	14	2.80
16	3	3	3	3	3	15	3.00
17	2	4	4	3	4	17	3.40
18	3	4	3	4	4	18	3.60
19	2	3	2	3	2	12	2.40
20	3	2	2	3	3	13	2.60
21	3	4	3	3	3	16	3.20
22	3	3	3	3	3	15	3.00
23	2	2	3	3	3	13	2.60
24	3	2	3	3	2	13	2.60

25	4	3	4	2	3	16	3.20
26	4	3	4	4	3	18	3.60
27	3	3	3	4	4	17	3.40
28	3	3	4	4	3	17	3.40
29	3	3	3	3	3	15	3.00
30	3	3	2	3	3	14	2.80
31	3	3	3	4	4	17	3.40
32	3	4	3	4	3	17	3.40
33	3	3	3	3	3	15	3.00
34	4	2	3	3	3	15	3.00
35	3	3	3	4	2	15	3.00
36	4	3	4	3	3	17	3.40
37	3	3	1	2	2	11	2.20
38	2	2	2	1	2	9	1.80
39	3	4	3	4	3	17	3.40
40	2	3	3	2	2	12	2.40
41	4	3	2	3	4	16	3.20
42	3	4	3	3	3	16	3.20
43	3	4	3	3	4	17	3.40
44	3	4	4	3	2	16	3.20
45	2	3	3	3	4	15	3.00
46	3	2	4	3	3	15	3.00
47	2	2	1	2	2	9	1.80
48	1	1	3	3	3	11	2.20
49	1	1	3	2	2	9	1.80
50	2	3	2	3	4	14	2.80
51	2	2	3	2	3	12	2.40
52	2	3	2	3	4	14	2.80
53	3	4	3	4	3	17	3.40
54	3	3	4	3	3	16	3.20
55	2	3	3	3	2	13	2.60
56	3	4	3	3	3	16	3.20
57	3	3	4	4	4	18	3.60
58	3	3	3	3	3	15	3.00
59	2	3	2	4	4	15	3.00
60	4	4	3	4	3	18	3.60
61	3	3	4	4	4	18	3.60
62	3	4	2	4	3	16	3.20
63	3	4	3	3	3	16	3.20
64	2	2	2	2	2	10	2.00
65	3	3	4	4	3	17	3.40
66	2	4	2	3	4	15	3.00
67	3	3	4	3	4	17	3.40
68	3	3	4	3	3	16	3.20
69	3	3	3	4	4	17	3.40

70	3	3	3	4	4	17	3.40
71	2	2	2	2	2	10	2.00
72	2	3	2	4	3	14	2.80
73	2	3	2	3	3	13	2.60
74	3	3	3	4	4	17	3.40
75	3	3	2	4	4	16	3.20
76	3	2	2	3	3	13	2.60
77	3	4	3	3	4	17	3.40
78	3	4	3	3	4	17	3.40
79	3	3	3	4	4	17	3.40
80	3	4	3	3	4	17	3.40
81	4	2	4	3	2	15	3.00
82	2	2	2	2	3	11	2.20
83	3	3	4	4	3	17	3.40
84	3	2	3	3	3	14	2.80
85	3	3	4	3	4	17	3.40
86	3	3	3	3	2	14	2.80
87	3	3	3	3	3	15	3.00
88	2	1	3	2	2	10	2.00
89	2	3	2	2	3	12	2.40
90	4	3	3	3	3	16	3.20
91	1	2	1	3	3	10	2.00
92	4	3	4	3	4	18	3.60
93	1	2	2	3	3	11	2.20
94	1	2	2	2	2	9	1.80
95	2	2	3	2	2	11	2.20
96	3	3	3	3	3	15	3.00
97	3	4	2	1	2	12	2.40
98	4	3	4	4	4	19	3.80
99	4	3	4	4	3	18	3.60
100	3	3	4	4	3	17	3.40

No	Sistem Perpajakan					Jumlah	Rerata
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5		
1	2	2	2	2	4	12	2.40
2	3	3	3	2	3	14	2.80
3	3	3	3	3	3	15	3.00
4	3	3	3	3	3	15	3.00
5	3	2	2	2	2	11	2.20
6	3	2	3	3	3	14	2.80
7	4	3	3	3	3	16	3.20
8	3	3	4	4	4	18	3.60
9	4	3	4	4	4	19	3.80
10	3	4	3	4	3	17	3.40
11	3	2	3	3	4	15	3.00
12	2	2	2	2	2	10	2.00
13	2	2	3	3	3	13	2.60
14	2	2	2	2	2	10	2.00
15	4	4	4	4	3	19	3.80
16	3	3	2	3	2	13	2.60
17	3	3	4	3	3	16	3.20
18	2	3	2	2	2	11	2.20
19	2	3	2	2	3	12	2.40
20	2	2	3	3	3	13	2.60
21	4	3	4	4	3	18	3.60
22	3	3	3	3	3	15	3.00
23	3	2	3	2	2	12	2.40
24	2	2	2	2	2	10	2.00
25	4	4	4	4	4	20	4.00
26	3	4	3	4	3	17	3.40

27	3	4	3	4	2	16	3.20
28	2	4	4	2	2	14	2.80
29	3	4	3	3	3	16	3.20
30	3	3	3	4	3	16	3.20
31	3	4	3	3	3	16	3.20
32	3	4	3	4	2	16	3.20
33	3	3	4	2	3	15	3.00
34	4	3	4	2	2	15	3.00
35	3	3	3	2	4	15	3.00
36	3	4	3	4	4	18	3.60
37	2	3	2	3	3	13	2.60
38	2	2	2	2	2	10	2.00
39	3	4	3	3	2	15	3.00
40	2	2	2	3	2	11	2.20
41	3	4	3	3	2	15	3.00
42	4	4	3	3	3	17	3.40
43	4	3	3	3	2	15	3.00
44	3	4	4	2	3	16	3.20
45	3	3	3	2	4	15	3.00
46	3	4	3	2	2	14	2.80
47	4	4	3	3	3	17	3.40
48	3	3	3	3	3	15	3.00
49	2	1	2	1	2	8	1.60
50	3	4	3	2	2	14	2.80
51	4	4	4	4	4	20	4.00
52	3	2	3	2	2	12	2.40
53	3	3	4	3	3	16	3.20
54	3	2	2	2	2	11	2.20
55	3	2	2	2	3	12	2.40
56	4	3	3	3	2	15	3.00
57	3	3	2	3	2	13	2.60
58	3	3	3	3	3	15	3.00
59	3	3	4	2	2	14	2.80
60	4	4	4	3	3	18	3.60
61	3	3	3	4	3	16	3.20
62	3	3	4	3	4	17	3.40
63	3	3	4	3	2	15	3.00
64	3	3	3	2	2	13	2.60
65	3	4	3	3	4	17	3.40
66	4	3	4	3	3	17	3.40
67	3	3	3	3	3	15	3.00
68	4	3	3	4	3	17	3.40
69	4	3	3	3	3	16	3.20
70	4	3	3	3	3	16	3.20
71	3	2	2	3	3	13	2.60

72	2	2	3	2	2	11	2.20
73	3	3	2	3	2	13	2.60
74	3	3	3	3	2	14	2.80
75	4	3	3	3	2	15	3.00
76	3	2	2	2	3	12	2.40
77	3	3	4	3	4	17	3.40
78	4	3	4	4	4	19	3.80
79	4	3	3	3	3	16	3.20
80	4	4	4	3	3	18	3.60
81	4	4	3	4	3	18	3.60
82	2	2	2	3	2	11	2.20
83	3	3	4	3	3	16	3.20
84	3	4	3	2	2	14	2.80
85	4	3	2	2	4	15	3.00
86	2	3	3	3	3	14	2.80
87	3	3	3	3	3	15	3.00
88	2	2	2	2	3	11	2.20
89	3	2	3	2	2	12	2.40
90	4	3	3	3	3	16	3.20
91	2	2	2	2	2	10	2.00
92	4	4	3	3	4	18	3.60
93	3	3	2	3	3	14	2.80
94	2	2	2	2	2	10	2.00
95	2	2	2	2	2	10	2.00
96	3	3	3	2	2	13	2.60
97	4	3	4	4	3	18	3.60
98	3	4	4	4	4	19	3.80
99	4	4	3	4	4	19	3.80
100	3	4	3	3	3	16	3.20

الجامعة الإسلامية العالمية
الاستاذة الدكتورة

No	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan					
	KTK 1	KTK 2	KTK 3	KTK 4	Jumla h	Rerat a
1	4	4	4	4	16	4.00
2	3	3	3	3	12	3.00
3	3	3	3	3	12	3.00
4	3	3	3	3	12	3.00
5	4	3	3	4	14	3.50
6	3	1	2	3	9	2.25
7	3	3	3	4	13	3.25
8	4	4	4	3	15	3.75
9	3	4	3	4	14	3.50
10	4	4	4	4	16	4.00
11	4	4	3	2	13	3.25
12	4	3	4	4	15	3.75
13	3	3	3	3	12	3.00
14	4	4	4	4	16	4.00
15	4	4	4	4	16	4.00
16	3	4	3	2	12	3.00
17	3	4	3	4	14	3.50
18	3	3	3	4	13	3.25
19	4	4	4	3	15	3.75
20	4	3	3	3	13	3.25
21	3	3	3	3	12	3.00
22	4	4	4	4	16	4.00
23	3	3	3	3	12	3.00
24	3	3	3	3	12	3.00
25	4	4	4	4	16	4.00
26	4	3	2	4	13	3.25

27	4	4	4	4	16	4.00
28	4	4	4	4	16	4.00
29	2	4	4	4	14	3.50
30	3	2	3	3	11	2.75
31	3	2	3	4	12	3.00
32	4	3	2	4	13	3.25
33	4	4	4	4	16	4.00
34	4	4	4	4	16	4.00
35	3	4	3	4	14	3.50
36	4	3	2	4	13	3.25
37	3	2	3	4	12	3.00
38	4	4	4	4	16	4.00
39	4	4	4	4	16	4.00
40	3	3	2	3	11	2.75
41	3	2	3	3	11	2.75
42	3	2	3	4	12	3.00
43	3	4	2	4	13	3.25
44	4	4	4	3	15	3.75
45	4	4	4	4	16	4.00
46	4	4	4	4	16	4.00
47	3	4	4	3	14	3.50
48	4	3	2	3	12	3.00
49	3	3	3	3	12	3.00
50	4	4	4	4	16	4.00
51	4	4	4	4	16	4.00
52	4	3	3	4	14	3.50
53	4	4	4	4	16	4.00
54	3	3	3	3	12	3.00
55	4	4	4	4	16	4.00
56	4	3	4	3	14	3.50
57	3	3	3	3	12	3.00
58	4	4	4	4	16	4.00
59	3	3	4	4	14	3.50
60	4	4	4	4	16	4.00
61	3	3	3	3	12	3.00
62	4	3	3	4	14	3.50
63	3	3	3	3	12	3.00
64	3	2	2	3	10	2.50
65	3	3	3	3	12	3.00
66	3	4	3	4	14	3.50
67	3	4	3	3	13	3.25
68	4	4	4	4	16	4.00
69	4	3	4	4	15	3.75
70	3	3	3	3	12	3.00
71	3	3	3	3	12	3.00

72	4	3	4	4	15	3.75
73	3	3	3	3	12	3.00
74	3	3	4	3	13	3.25
75	2	3	3	3	11	2.75
76	3	3	3	3	12	3.00
77	3	3	3	4	13	3.25
78	3	3	4	3	13	3.25
79	4	3	3	4	14	3.50
80	3	3	3	3	12	3.00
81	4	4	4	4	16	4.00
82	4	4	4	4	16	4.00
83	3	3	4	4	14	3.50
84	4	4	4	4	16	4.00
85	4	4	4	4	16	4.00
86	4	2	3	3	12	3.00
87	4	4	4	4	16	4.00
88	4	4	4	4	16	4.00
89	3	2	3	3	11	2.75
90	4	4	4	4	16	4.00
91	3	2	4	4	13	3.25
92	4	4	4	4	16	4.00
93	3	2	3	4	12	3.00
94	3	1	3	4	11	2.75
95	4	4	4	4	16	4.00
96	3	3	2	4	12	3.00
97	3	2	3	4	12	3.00
98	4	4	4	4	16	4.00
99	4	4	3	3	14	3.50
100	3	4	3	4	14	3.50

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

No	Diskriminasi					
	D1	D2	D3	D4	Jumlah	Rerata
1	3	3	3	3	12	3.00
2	3	2	3	3	11	2.75
3	3	3	3	3	12	3.00
4	2	3	3	3	11	2.75
5	2	2	2	2	8	2.00
6	2	3	3	3	11	2.75
7	2	2	3	3	10	2.50
8	1	1	1	1	4	1.00
9	1	1	1	1	4	1.00
10	1	1	1	1	4	1.00
11	1	1	1	2	5	1.25
12	2	2	2	2	8	2.00
13	2	2	2	2	8	2.00
14	1	1	3	4	9	2.25
15	1	1	1	1	4	1.00
16	3	3	3	2	11	2.75
17	2	2	2	2	8	2.00
18	2	2	2	2	8	2.00
19	4	3	3	4	14	3.50
20	3	3	3	3	12	3.00
21	3	3	3	4	13	3.25
22	2	2	3	4	11	2.75
23	2	4	2	3	11	2.75
24	3	4	3	3	13	3.25
25	1	1	1	1	4	1.00
26	1	1	1	1	4	1.00
27	3	3	2	3	11	2.75

28	1	1	1	1	4	1.00
29	1	1	1	1	4	1.00
30	3	3	4	3	13	3.25
31	4	3	3	3	13	3.25
32	2	2	3	2	9	2.25
33	2	2	3	3	10	2.50
34	2	2	3	4	11	2.75
35	4	2	3	4	13	3.25
36	3	3	3	3	12	3.00
37	4	3	2	3	12	3.00
38	1	1	3	4	9	2.25
39	4	2	4	3	13	3.25
40	1	2	3	3	9	2.25
41	4	3	3	4	14	3.50
42	3	2	3	4	12	3.00
43	2	2	4	3	11	2.75
44	2	2	3	2	9	2.25
45	2	2	2	2	8	2.00
46	4	4	3	4	15	3.75
47	2	2	3	4	11	2.75
48	1	1	2	1	5	1.25
49	1	1	2	1	5	1.25
50	3	4	3	4	14	3.50
51	2	1	1	1	5	1.25
52	3	3	4	3	13	3.25
53	3	3	2	2	10	2.50
54	4	2	3	3	12	3.00
55	3	3	3	4	13	3.25
56	3	2	3	3	11	2.75
57	4	1	3	3	11	2.75
58	2	1	3	4	10	2.50
59	3	1	4	3	11	2.75
60	4	3	3	3	13	3.25
61	1	1	2	2	6	1.50
62	1	2	2	3	8	2.00
63	1	1	1	3	6	1.50
64	2	1	2	3	8	2.00
65	3	2	4	3	12	3.00
66	3	2	3	3	11	2.75
67	3	2	4	3	12	3.00
68	4	3	3	4	14	3.50
69	4	1	4	4	13	3.25
70	4	2	3	3	12	3.00
71	2	2	3	3	10	2.50
72	4	4	4	4	16	4.00

73	2	2	2	2	8	2.00
74	4	4	4	4	16	4.00
75	2	1	2	2	7	1.75
76	2	1	2	1	6	1.50
77	2	3	3	3	11	2.75
78	2	2	3	3	10	2.50
79	3	3	3	3	12	3.00
80	3	3	3	4	13	3.25
81	2	1	2	3	8	2.00
82	3	3	4	3	13	3.25
83	3	3	4	3	13	3.25
84	3	3	3	3	12	3.00
85	3	2	3	4	12	3.00
86	3	3	4	3	13	3.25
87	4	3	3	4	14	3.50
88	1	1	1	1	4	1.00
89	2	1	4	4	11	2.75
90	2	2	2	2	8	2.00
91	2	1	2	3	8	2.00
92	3	2	2	2	9	2.25
93	2	2	2	2	8	2.00
94	2	2	2	2	8	2.00
95	2	2	2	1	7	1.75
96	3	3	3	3	12	3.00
97	1	1	1	1	4	1.00
98	3	3	2	3	11	2.75
99	1	1	1	1	4	1.00
100	3	3	3	3	12	3.00

الجامعة الإسلامية
الاستاذة الأندلسية

LAMPIRAN 3
HASIL UJI DESKRIPSI RESPONDEN

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	48	48.0	48.0	48.0
	Wanita	52	52.0	52.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25-30 tahun	26	26.0	26.0	26.0
	31-35 tahun	13	13.0	13.0	39.0
	36-40 tahun	9	9.0	9.0	48.0
	> 40 tahun	52	52.0	52.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	4	4.0	4.0	4.0
	S1	63	63.0	63.0	67.0
	S2	11	11.0	11.0	78.0
	S3	2	2.0	2.0	80.0
	Lainnya	20	20.0	20.0	100.0

Total	100	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pegawai Swasta	13	13.0	13.0	13.0
Pegawai Negeri	52	52.0	52.0	65.0
Wiraswasta	9	9.0	9.0	74.0
Lainnya	26	26.0	26.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

LAMPIRAN 4

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Etika Penggelapan Pajak	100	1.00	4.00	2.4832	.79423
Keadilan Pajak	100	1.80	3.80	2.9460	.51785
Sistem Perpajakan	100	1.60	4.00	2.9380	.52777
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	100	2.25	4.00	3.4350	.46278
Diskriminasi	100	1.00	4.00	2.4700	.79557
Valid N (listwise)	100				

LAMPIRAN 5
HASIL UJI KUALITAS DATA
UJI VALIDITAS

Variabel Dependen (Etika Penggelapan Pajak)

		Correlations						Etika Penggelapa n Pajak
		EPP1	EPP2	EPP3	EPP4	EPP5	EPP6	
EPP1	Pearson Correlation	1	.736**	.716**	.732**	.659**	.585**	.886**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
EPP2	Pearson Correlation	.736**	1	.575**	.627**	.583**	.592**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
EPP3	Pearson Correlation	.716**	.575**	1	.694**	.577**	.518**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
EPP4	Pearson Correlation	.732**	.627**	.694**	1	.653**	.538**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100

EPP5	Pearson Correlation	.659**	.583**	.577**	.653**	1	.726**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
EPP6	Pearson Correlation	.585**	.592**	.518**	.538**	.726**	1	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Etika Penggelapan Pajak	Pearson Correlation	.886**	.825**	.816**	.854**	.835**	.785**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Independen (Keadilan Pajak)

		Correlations					Keadilan Pajak
		KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
KP1	Pearson Correlation	1	.440**	.477**	.369**	.209*	.724**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.037	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KP2	Pearson Correlation	.440**	1	.123	.390**	.389**	.674**
	Sig. (2-tailed)	.000		.223	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KP3	Pearson Correlation	.477**	.123	1	.391**	.207*	.645**
	Sig. (2-tailed)	.000	.223		.000	.039	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KP4	Pearson Correlation	.369**	.390**	.391**	1	.553**	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KP5	Pearson Correlation	.209*	.389**	.207*	.553**	1	.663**
	Sig. (2-tailed)	.037	.000	.039	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.724**	.674**	.645**	.771**	.663**	1

Keadilan Pajak	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Independen (Sistem Perpajakan)

		Correlations					Sistem Perpajakan
		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	
SP1	Pearson Correlation	1	.498**	.516**	.485**	.339**	.760**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP2	Pearson Correlation	.498**	1	.507**	.501**	.271**	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.006	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP3	Pearson Correlation	.516**	.507**	1	.428**	.359**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP4	Pearson Correlation	.485**	.501**	.428**	1	.441**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP5	Pearson Correlation	.339**	.271**	.359**	.441**	1	.651**
	Sig. (2-tailed)	.001	.006	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100

Sistem Perpajakan	Pearson Correlation	.760**	.757**	.756**	.776**	.651**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Variabel Independen (Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan)

Correlations

		KTK1	KTK2	KTK3	KTK4	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan
KTK1	Pearson Correlation	1	.477**	.456**	.374**	.751**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
KTK2	Pearson Correlation	.477**	1	.542**	.246*	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.014	.000
	N	100	100	100	100	100
KTK3	Pearson Correlation	.456**	.542**	1	.346**	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
KTK4	Pearson Correlation	.374**	.246*	.346**	1	.617**
	Sig. (2-tailed)	.000	.014	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.751**	.803**	.800**	.617**	1

Kemungkinan n Terdeteksi Kecurangan	Sig. (2-tailed) N	.000 100	.000 100	.000 100	.000 100	100
---	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Independen (Diskriminasi)

Correlations

		D1	D2	D3	D4	Diskriminasi
D1	Pearson Correlation	1	.648**	.651**	.613**	.869**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
D2	Pearson Correlation	.648**	1	.511**	.505**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
D3	Pearson Correlation	.651**	.511**	1	.739**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
D4	Pearson Correlation	.613**	.505**	.739**	1	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100

Diskriminasi	Pearson Correlation	.869**	.787**	.859**	.852**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



LAMPIRAN 6

HASIL UJI KUALITAS DATA

Uji reliabilitas

Variabel Dependen (Etika Penggelapan Pajak)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.912	6

Variabel Independen (Keadilan Pajak)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.731	5

Variabel Independen (Sistem Perpajakan)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.793	5

Variabel Independen (Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.730	4

Variabel Independen (Diskriminasi)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.863	4

LAMPIRAN 7

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.51793099
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.064
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	5.414	.515		10.521	.000		
	Keadilan Pajak	-.418	.128	-.273	-3.278	.001	.647	1.547
	Sistem Perpajakan	-.404	.125	-.268	-3.236	.002	.651	1.537
	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	-.483	.117	-.281	-4.132	.000	.965	1.036
	Diskriminasi	.464	.070	.465	6.623	.000	.907	1.102

a. Dependent Variabel: Etika Penggelapan Pajak

Uji Heteroskedisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.407	.277		1.467	.146
	Keadilan Pajak	-.051	.069	-.094	-.743	.460
	Sistem Perpajakan	.017	.067	.032	.257	.798
	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	.008	.063	.013	.129	.898
	Diskriminasi	.040	.038	.112	1.046	.298

a. Dependent Variabel: Abs_res

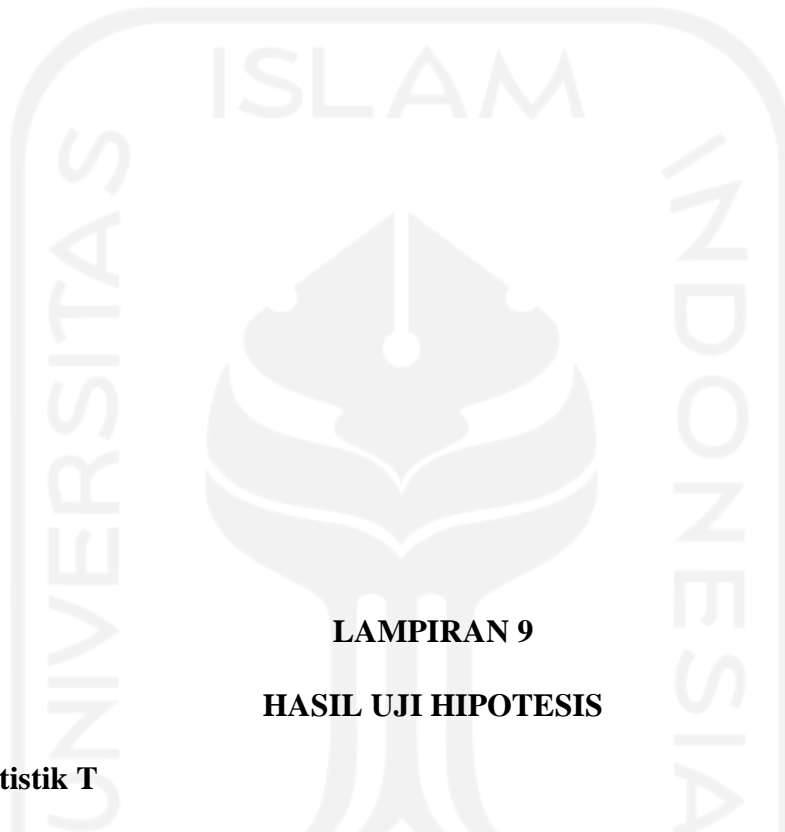


LAMPIRAN 8
ANALISIS REGRESI BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.414	.515		10.521	.000		
	Keadilan Pajak	-.418	.128	-.273	-3.278	.001	.647	1.547
	Sistem Perpajakan	-.404	.125	-.268	-3.236	.002	.651	1.537
	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	-.483	.117	-.281	-4.132	.000	.965	1.036
	Diskriminasi	.464	.070	.465	6.623	.000	.907	1.102

a. Dependent Variabel: Etika Penggelapan Pajak



LAMPIRAN 9
HASIL UJI HIPOTESIS

Uji Statistik T

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model	B	Std. Error	Beta					Tolerance
1	(Constant)	5.414	.515		10.521	.000		
	Keadilan Pajak	-.418	.128	-.273	-3.278	.001	.647	1.547
	Sistem Perpajakan	-.404	.125	-.268	-3.236	.002	.651	1.537
	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	-.483	.117	-.281	-4.132	.000	.965	1.036
	Diskriminasi	.464	.070	.465	6.623	.000	.907	1.102

a. Dependent Variabel: Etika Penggelapan Pajak

Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.892	4	8.973	32.098	.000 ^b
	Residual	26.557	95	.280		
	Total	62.449	99			

a. Dependent Variabel: Etika Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak

Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	.575	.557	.52872

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Kemungkinan

Terdeteksi Kecurangan, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak

b. Dependent Variabel: Etika Penggelapan Pajak